PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
No. Dat. AF 1357/per-comp/2011
ANGGAL 24-10-2011

ANALISIS PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM MEMPERBAIKI KINERJA PADA PT. KERETA API (PERSERO) DEVISI REGIONAL III SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

OLEH :

NAMA : GITA EVITA
NIM : 22 2007 118

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2011

ANALISIS PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM MEMPERBAIKI KINERJA PADA PT. KERETA API (PERSERO) DEVISI REGIONAL III SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

OLEH :

NAMA : GITA EVITA
NIM : 22 2007 118

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2011

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gita Evita

Nim : 222007118

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palembang, September 2011

Penulis

Gita Evita

Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : **ANALISIS PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM MEMPERBAIKI KINERJA PADA PT. KERETA API (PERSERO) DEVISI REGIONAL III SUMATERA SELATAN**

Nama : **Gita Evita**
NIM : **22.2007.118**
Fakultas : **Ekonomi**
Jurusan : **Akuntansi**
Mata Kuliah Pokok : **Akuntansi Sektor Publik**

Diterima dan Disyahkan
Pada Tanggal..16-10-2011.....

Pembimbing

(Dr. Sa'adah Siddik SE.,Ak.,M.Si)

Mengetahui
Dekan
u.b. Ketua Jurusan Akuntansi

(Drs. Sunardi, S.E., M.Si)

Motto:

- ***Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat masa depan dengan ketakutan, tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran.***
- ***Jagalah penampilan dirimu, berpakaianlah sesuai dengan kondisi yang engkau hadapi, jadikan kerapihan pakaian sebagai bagian dari hidupmu.***

(Gita)

Terucap Syukur Pada Allah Swt

Kupersembahkan Dengan Segenap Cinta dan Kasih Sayang kepada:

» *Papa dan Ibuku tersayang*

» *Adikku (Debby, Vera, Rizki)*

» *Seseorang yang kelak mendampingi hidupku*

» *Sahabat-sahabatku*

» *Pembimbing skripsi*

» *Almamaterku*

بسم الله الرحمن الرحيم

Prakata

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdullilahirobbil a'lamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* dalam Memperbaiki Kinerja Pada PT. Kereta Api Devisi Regional III Sumatera Selatan.

Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* pada PT. Kereta Api Devisi Regional III Sumatera Selatan, belum sesuai dengan pedoman pokok pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang telah ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG). Hal inilah yang membuat penulis melakukan penelitian yang berjudul Analisis Penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada PT. Kereta Api Devisi Regional III Sumatera Selatan.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku (RA. Syafardi SF dan Efianti) tercinta yang telah mendidik, membiayai, mendo'akan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis. Adik-adikku tersayang (Debby, Vera, Rizki) yang selalu memberikan semangat kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada ibu Dr. Sa'adah Siddik, SE.,Ak.,M.Si, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Palembang.

1. Bapak H. M. Idris, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak M. Taufiq Syamsuddin S.E.,Ak.,M.Si selaku Dekan pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Sunardi, SE, M.Si dan ibu Wely SE.,M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Rosalina Ghazali SE, M.Si selaku Pembimbing Akademik beserta dosen-dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Manajer dan karyawan/karyawati PT. Kereta Api Devisi Regional III Sumatera Selatan.
6. Teman seperjuanganku Luluk Fuadah dan Winda Hesti
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang Agustus 2011

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN COVER..... i

HALAMAN JUDUL..... ii

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT..... iii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... iv

HALAM MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... v

HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH..... vi

HALAMAN DAFTAR ISI..... viii

HALAMAN DAFTAR TABEL..... xi

HALAMAN LAMPIRAN..... xii

ABSTRAK..... xiii

ABSTRAK INGGRIS..... xiv

BAB. I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Perumusan Masalah..... 5

C. Tujuan Penelitian..... 5

D. Manfaat Penelitian..... 5

BAB. II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu..... 7

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALOPO
PERPUSTAKAAN

B. Landasan Teori..... 8

1. *Good Corporate Governance*

a. Pengertian *Good corporate governance*..... 8

b. Kegunaan *Good corporate governance*..... 9

c. Prinsip-prinsip *Good corporate Governance*..... 10

d. Asas *Good corporate governance*..... 12

e. Kriteria Penerapan *Good corporate governance*..... 17

2. Kinerja

a. Pengertian Kinerja..... 18

b. Tahap Penilaian Kinerja..... 18

c. Skala Ukuran Penilaian Kinerja 19

Manajemen Berdasarkan Penerapan Prinsip-prinsip *Good corporate governance*

BAB. III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian..... 21

B. Tempat Penelitian..... 22

C. Operasionalisasi Variabel..... 22

D. Populasi 23

E. Data yang Diperlukan..... 23

F. Teknik Pengumpulan Data..... 24

G. Analisis Data dan Teknik Analisis..... 25

BAB. IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum PT. Kereta Api Devisi..... 26
Regional III Sumatera Selatan

2. Hasil Penelitian..... 41

B. Pembahasan

1. *Good corporate governance*..... 51

2. Kinerja..... 59

BAB. V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan..... 62

B. Saran..... 62

DAFTAR PUSTAKA..... 63

LAMPIRAN..... 65

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel..... 22

Tabel IV.1 Laporan Laba Rugi..... 59

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 : Penyimpangan Terhadap Prinsip-prinsip..... 65
Good Corporate Governance (GCG)

Lampiran 2 : Jawaban Responden Mengenai..... 66
Good Corporate Governance (GCG)

Lampiran 3 : Format angket..... 79

ABSTRAK

Gita Evita/ 22 2007 118/ 2011 "**Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Memperbaiki Kinerja Pada PT. Kereta Api (persero) Devisi Regional III Sumatera Selatan.**

Tujuannya untuk mengetahui penerapan *good corporate governance* dalam memperbaiki kinerja pada PT. Kereta Api Devisi Regional III Sumatera Selatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance.*

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui penerapan *good corporate governance* pada PT. Kereta Api yang tidak terlaksana dengan baik. Populasi pada penelitian ini sebanyak 13 orang. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Teknik yang digunakan wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dengan Teknik analisis pada penelitian ini yakni penulis menjelaskan tentang fenomena masalah yang ada pada PT. Kereta Api kemudian dihubungkan dengan beberapa teori.

Hasil analisis menunjukkan bahwa (simpulan) prinsip-prinsip *good corporate governance* belum terlaksana dengan baik pada PT. Kereta Api Devisi Regional III Sumatera Selatan. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* itu sendiri, meliputi prinsip transparansi *(transparency)*, kemandirian *(independence)*, akuntabilitas *(accountability)*, pertanggungjawaban *(responsibility)*, dan kewajaran *(fairness)*. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan para karyawan mengenai prinsip-prinsip *good corporate governance* itu sendiri.

Kata kunci: *Good corporate governance*, Kinerja usaha

ABSTRACT

Gita Evita/ 22 2007 118/ 2011 " **The analysis oof good corporate governance implementation in improving the performance at PT. Kereta Api (Persero) Devisi Regional III South Sumatera ".**

The purpose of this study was to find out the implementation of good corporate governance in improving performance at PT. Kereta Api (Persero) Devisi Regional III South Sumatera branch based on the principles of good corporate governance.

This study use descriptive research, that was the study to know the implementation of *good corporate governance* at PT. Kereta Api wich did work well applay. Populations in it was thirteen person who related with that operational company directly. The data used in this study was primary data. The techniques of collecting the data were interviews, questionnaires, and report. Data analysis in this study was a qualitative analysis. The technique of analysis data was to explan the performance problem at PT. Kereta Api dealing with some theories.

The result showed that the principles of good corporate governance had not been applied well at PT. Kereta api. It could be seen on the implementation of the principles of good corporate governance. That was including the principles of transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness. This was due to the lack of employes knowledge about the principles of good corporate governance.

Key words : Good corporate governance, businnes performance

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program atau kebijakan di dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang di dalam skema strategi organisasi (Indra, 2000: 329). Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai prestasi manajer dalam unit organisasi yang dipimpinnya.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat kontrol organisasi pemerintah yang bertujuan untuk memotivasi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi. Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sulit untuk dilakukan secara objektif. Kesulitan ini disebabkan belum pernah disusunnya suatu sistem pengukuran kinerja yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan suatu organisasi secara khusus.

Pengukuran kinerja yang dilaksanakan secara berkelanjutan memberikan tingkat pencapaian kinerja yang kemudian hasilnya berupa umpan balik yang merupakan hal penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan dimasa yang akan datang. Melalui pengukuran kinerja diharapkan instansi/lembaga/ organisasi dapat diukur dan dievaluasi dengan adanya suatu pengukuran kinerja. Kinerja perusahaan yang baik harus sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance*, yang

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR PERPUSTAKAAN

salah satunya berfungsi untuk "mengebalkan" perusahaan dari kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan.

Menurut Edi dkk (2004: 85), *good corporate governance* adalah suatu sistem struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham, serta mengkombinasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan berbagai pihak perusahaan seperti: kreditur, supplier, asosiasi usaha, konsumen, pekerja pemerintah, dan masyarakat.

Good corporate governance adalah suatu istilah yang tidak asing lagi dengan keadaan saat ini, khususnya dalam dunia perekonomian. Pengelolaan perusahaan *(corporate governance)* telah dianggap penting bagi dunia usaha sebagaimana di dalam pemerintahan. Penerapan *corporate governance* yang efektif pada bank, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan perusahaan publik memberikan sumbangan yang sangat penting dalam memperbaiki kondisi perekonomian, serta menghindari terjadinya krisis dan kegagalan di masa depan. Pelaksanaan *good corporate governance* diharapkan perusahaan dan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan kaidah yang sehat disegala bidang (Kunami, 2008).

Penerapan *good corporate governance* perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan. Tiga pilar itu bertujuan untuk dapat menciptakan pasar yang efisien, transparan, dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan yaitu negara dan perangkatnya yang menciptakan peraturan perundang-undangan, dunia usaha sebagai pelaku pasar yang menerapkan *good corporate governance* sebagai pedoman pelaksanaan, masyarakat

sebagai pengguna produk dan jasa serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan (Wahyudin, 2008: 36).

Kriteria penerapan *good corporate governance* yang ba k meliputi adanya pemahaman dan komitmen untuk melaksanakan *gooc corporate governance* oleh semua anggota direksi. Melakukan kajian terhadap kondisi perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan *good corporate governance* dan tindakan korektif yang diperlukan. Menyusun program dan pedoman pelaksanaan *good corporate governance* perusahaan. Melakukan internalisasi pelaksanaan *good corporate governance*. Melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atau dengan menggunakan jasa pihak eksternal yang independen untuk memastikan penerapan *good corporate governance*. Hasil penilaian tersebut diungkapkan dalam laporan tahunan dan dilaporkan dalam rapat umum pemegang saham tahunan (Kunami, 2008).

Menurut pengamatan penulis, prinsip-prinsip *good corporate governance* yang ada PT. Kereta Api tampak belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat terlihat pada bidang operasional, bidang sumber daya manusia, bidang keuangan, maupun bidang komersial.

Pada bidang operasional, kegiatan yang belum memenuhi prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan baik adalah penjagaan pintu kereta api yang belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan pelayanan pada setiap stasiun yang belum optimal. Prinsip-prinsip *good corporate governance* yang belum diterapkan dengan baik adalah prinsip akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.

Pada bidang sumber daya manusia, kegiatan yang belum memenuhi prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan baik adalah pada pembagian tugas pegawai dan pelaksanaannya belum lengkap dan belum semuanya memiliki surat keputusan fungsional. Prinsip-prinsip *good corporate governance* yang belum diterapkan dengan baik adalah prinsip akuntabilitas dan pertanggungjawaban.

Pada bidang keuangan, kegiatan yang belum memenuhi prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan baik adalah pengelolaan administrasi buku kas, buku pembantu kas dan bukti pendukung belum optimal. Prinsip-prinsip *good corporate governance* yang belum diterapkan dengan baik yaitu prinsip transparansi dan pertanggungjawaban. Penjelasan lebih lengkap tentang kegiatan-kegiatan pada PT. Kereta Api yang belum menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang baik untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 1.

Pada bidang komersial, kegiatan yang belum memenuhi prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan baik adalah angkutan penumpang yang belum optimal. Prinsip-prinsip *good corporate governance* yang belum diterapkan dengan baik adalah prinsip akuntabilitas, kemandirian, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

Dapat disimpulkan bahwa hampir pada semua bidang kegiatan pada PT. Kereta Api prinsip-prinsip *good corporate governance* belum dapat terlaksaa dengan baik, padahal PT. Kereta Api telah menerapkan *good corporate governance* sejak tahun 2003. Berdasarkan alasan tersebut, maka penulis

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Memperbaiki Kinerja Pada PT. Kereta Api (Persero) Divisi Regional III Sumatera Selatan.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan permasalahan apakah penerapan *good corporate governance* dalam memperbaiki kinerja pada PT. Kereta Api (Persero) Devisi Regional III Sumatera Selatan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance?*

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan *good corporate governance* pada PT. Kereta Api (Persero) Devisi Regional III Sumatera Selatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance.*

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut :

a. Bagi penulis

Menambah pengetahuan penulis mengenai penerapan *good corporate governance* dalam memperbaiki kinerja.

b. Bagi PT. Kereta Api (Persero) Divisi Regional III Sumatera Selatan

Sebagai bahan masukan mengenai prinsip-prinsip *good corporate governance* yang tidak dapat terlaksana dengan baik, sehingga dikemudian hari prinsip-prinsip *good corporate governance* dapat terlaksana dengan baik.

c. Bagi Almamater

Sebagai bahan pertimbangan penting bagi penelitian yang serupa dimasa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian sebelumnya

Penelitian sebelumnya berjudul pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap tingkat kesehatan perbankan oleh Suci (2005). Perumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah Bagaimana pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap tingkat kesehatan perbankan? Variabel yang digunakan adalah *good corporate governance*, dan perbankan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suci menyimpulkan bahwa dengan diterapkan atau tidak diterapkannya *good corporate governance* pada perusahaan perbankan tidak membuat kondisi kesehatan perbankan menjadi semakin baik, kemudian rendahnya pemahaman terhadap arti penting strategi penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* oleh pelaku bisnis.

Penelitian lainnya adalah pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan pada perusahaan yang termasuk kelompok sepuluh besar menurut *corporate governance* perception index (CGPI) oleh Dita (2007). Perumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah Bagaimana pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan pada perusahaan yang termasuk kelompok sepuluh besar menurut *corporate governance* perception index (CGPI)? Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah *good corporate governance* dan perusahaan yang termasuk kelompok sepuluh besar menurut *corporate governance* perception

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR PERPUSTAKAAN

index (CGPI). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dita menunjukkan bahwa akibat dari penyimpangan prinsip-prinsip *good corporate governance* merugikan perseroan dan pemegang saham.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan sekarang adalah sama-sama ingin mengetahui pelaksanaan *good corporate governance* terhadap kinerja pada sebuah perusahaan. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan sekarang adalah jika penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap tingkat kesehatan perbankan dan untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan pada perusahaan yang termasuk kelompok sepuluh besar menurut *corporate governance* perception index (CGPI). Penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui penerapan *Good Corporate Governance* dalam memperbaiki kinerja yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada PT. Kereta Api (Persero) Devisi Regional III Sumatera Selatan.

B. Landasan teori

1. *Good Corporate Governance*

a. Pengertian *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk meningkatkan keberhasilan dan akuntabilitas guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan

kepentingan *stakeholders* lainnya berdasarkan peraturan dan nilai etika (Johny, 2004: 8)

Good Corporate Governance adalah suatu sistem, proses dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan *(stakeholders)* (Wahyudin, 2008: 7)

b. Kegunaan *Good Corporate Governance*

Menurut Edi dkk (2004: 98) *corporate* yang baik diakui "mengebalkan" perusahaan dari kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan. *Corporate governance* yang baik telah terbukti meningkatkan kinerja perusahaan sampai 30% diatas tingkat kembalian yang normal *(rate of return)*. Penerapan *good corporate governance* yang baik memberikan manfaat sebagai berikut:

1) Perbaikan dan komunikasi
2) Minimalisasi potensial benturan
3) Fokus pada strategi-strategi utama
4) Peningkatan dalam produktifitas dan efisiensi
5) Kesinambungan manfaat
6) Promosi citra korporat
7) Peningkatan kepuasan pelanggan
8) Perolehan kepercayaan investor

Menurut *The Forum for Corpoprate Governance in Indonesia*, kegunaan dari *Corporate Governance* yang baik adalah:

1) Lebih mudah memperoleh modal
2) Biaya modal *(cost of capital)*
3) Memperbaiki kinerja usaha
4) Mempengaruhi harga saham
5) Memperbaiki kinerja ekonomi

Good corporate governance yang baik merupakan langkah yang penting dalam membangun kepercayaan pasar *(marketing confidance)* dan mendorong arus investasi internasional yang lebih stabil dan bersifat jangka panjang. Perusahaan dijalankan akan mempengaruhi kesejahteraan dalam masyarakat secara keseluruhan. Agar dapat mencapai fungsi penciptaan kemakmuran, perusahaan harus beroperasi dalam suatu kerangka kerja yang mempertahankan perusahaan fokus pada tujuannya dan akuntabel untuk tindakannya.

c. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*

Prinsip *good corporate governance* merupakan kaidah, norma ataupun pedoman korporasi yang dipelakukan dalam sistem pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sehat (Johny, 2004: 8).

Prinsip-prinsip *good corporate governance*

1) Transparansi *(transparency)*

Transparansi *(transparency)* yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam

mengumumkan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan (Johny, 2004: 8)

2) Kemandirian *(independency)*

Kemandirian *(independence)* yaitu suatu keadaan perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat (Johny, 2004: 8)

3) Akuntabilitas (*accountability)*

Akuntabilitas (*accountability)* yaitu kejelasan terhadap fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ, sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif (Jhony, 2004: 8)

4) Pertanggungjawaban *(responsibility)*

Pertanggungjawaban *(responsibility)* yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat (Johny, 2004: 8)

5) Kewajaran *(fairness)*

Kewajaran *(fairness)* yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Johny, 2004. 8)

d. Asas *Good Corporate Governance (GCG)*

Asas *good corporate governance* meliputi:

1) Transparansi *(transparency)*

Prinsip Dasar

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya (Wahyudin, 2008: 39).

Pedoman pokok pelaksanaan

a) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
b) Informasi yang harus diungkapkan meliputi, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya yang memiliki benturan kepentingan, sistem manajemen resiko,

sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan *good corporate governance* serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.

c) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

d) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proposional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan (Wahyudin, 2008: 39).

2) Kemandirian *(independency)*

Prinsip Dasar

Untuk melancarkan pelaksanaan asas *good corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara *independen* sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain (Wahyudin, 2008: 40).

Pedoman pokok pelaksanaan

a) Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh

atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.

b) Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugas sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem pengendalian internal secara objektif (Wahyudin, 2008: 40).

3) Akuntabilitas *(accountability)*

Prinsip Dasar

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan (Wahyudin, 2008: 39).

Pedoman pokok pelaksanaan

a) Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan da semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran dan strategi perusahaan.

b) Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan *good corporate governance*.

c) Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.

d) Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran utama dan strategi perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi *(reward and punishment system)*.

e) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku *(code of conduct)* yang telah disepakati (Wahyudin, 2008: 40).

4) Pertanggungjawaban *(responsibility)*

Prinsip dasar

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen* (pelaksanaan dalam sistem tata kelola yang baik) (Wahyudin,2008: 40).

Pedoman pokok pelaksanaan

a) Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan *(by laws)*.
b) Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab social antara laian dengan peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai (Wahyudin, 2008: 40).

5) Kewajaran *(fairness)*

Prinsip Dasar

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (Wahyudin, 2008: 41).

Pedoman pokok pelaksanaan

a) Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.

b) Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

c) Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, jender, dan kondisi fisik (Wahyudin, 2008: 41).

e. Kriteria Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* yang baik

Kriteria penerapan *good corporate governance* yang baik meliputi:

1) Adanya pemahaman, kepedulian dan komitmen untuk melaksanakan *good corporate governance* oleh semua naggota direksi, dewan komisaris dan pemegang saham pengendalian, serta semu karyawan.
2) Melakukan kajian terhadap kondisi perusahaan yang berkaiatan denga pelaksanaan *good corporate governance* dan tindakan korektif.
3) Menyususn program dan pedoman pelaksanaan *good corporate governance* perusahaan.
4) Melakukan internalisasi pelaksanaan *good corporate governance* sehingga terbentuk rasa memiliki dari semua pihak dalam perusahaan, serta pemahaman atas pelaksanaan pedoman *good corporate governance* dalam kegiatan sehari-hari.
5) Melakukan penilaian sendiri *(self assessment)* atau dengan menggunakan jasa pihak eksternal yang independent untuk

memastikan penerapan *good corporate governance* secara berkesinambungan. Hasil penilaian tersebut diungkapkan dalam laporan tahunan dan dilaporklan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan (Kunami, 2008)

2. Kinerja

a. Pengertian Kinerja

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program atau kebijakan di dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang di dalam skema strategi organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam periode tertentu (Indra, 2000: 329).

b. Tahap penilaian kinerja usaha

Penilain kinerja dilaksanakan dalam dua tahap utama, yaitu:

1) Tahap Persiapan

Tahap persiapan adalah seluruh tahap fase perencanaan penialain kinerja bagi para manajer yang membawahi suatu unit kerja tertentu dan juga untuk memberi informasi yang jelas kepada manajer sebelum aktifitasnya serta pada fase ini dibuat suatu kesepakatan diantara para pelaksana perusahaan tentang bagaimana mereka akan dinilai kerjanya. Tahap persiapan terdiri dari tiga rinci, yaitu:

a) Pembandingan daerah pertanggungjawaban dan manajer yang bertanggung jawab.

b) Penetapan kinerja yang dipakai untuk mengukur kinerja.

c) Pengukuran kinerja sesungguhnya.

2) Tahap Penilaian

Tahap penilaian adalah seluruh fase pengukuran hasil kerja para manajer dan membandingkannya dengan uuran-ukuran yang telah disepakati. Tahap penilaian terdiri dari dua tahap rinci, yaitu:

a) Pembandingan kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam standar.

b) Penegakan perilaku yang diinginkan dan tindakan yang digunakan untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan (Mulyadi, 2001: 420).

c. Skala Ukur Penilaian Kinerja Manajemen Berdasarkan Penerapan Prinsip-prinsip GCG

1) Baik, berarti praktek yang ada sudah memenuhi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

2) Perlu peningkatan, berarti praktek yang ada baru memenuhi prinsip minimal yang dikehendaki.

3) Perlu perbaikan, berarti praktek yang ada belum mencerminkan prinsip-prinsip GCG secara umum perbaikan yang signifikan.

4) Buruk, berarti belum ada praktek yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG atau praktek ynag bertentangan dengan prinsip-prinsip GCG (Siskie, 2009)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian berdasarkan tingkat eksplansinya dibagi tiga macam:

1. Penelitian Deskriptif

   Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel, baik satu variabel atau lebih *(independen)* tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

2. Penelitian Komparatif

   Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan, yang variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri tetapi yang untuk lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.

3. Penelitian Asosiatif

   Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiono, 2006: 11).

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui penerapan *good corporate governance* pada PT. Kereta Api yang tidak terlaksana dengan baik.

B. Tempat penelitian

Unit penelitian adalah PT. Kereta Api (Persero) Divisi Regional III Sumatera Selatan dengan alamat Jl. Jendral A. Yani No 541 13 Ulu Plaju.

C. Operasionalisasi Variabel

Tabel III. 1
Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	*Good Corporate Governance*	Suatu sistem struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham, serta mengkombinasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan berbagai pihak perusahaan seperti: kreditur, supplier, asosiasi usaha, konsumen, pekerja pemerintah, dan masyarakat.	• Transparansi *(transparency)* • Kemandirian *(independency)* • Akuntabilitas *(accountability)* • Pertanggungjawaban *(responsibility)* • Kewajaran *(fairness)*
2	Kinerja	Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program atau kebijakan di dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang di dalam skema strategi organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam periode tertentu.	• Laba/rugi

Sumber: *Penulis, 2011*

D. Populasi

Penelitian ini dilakukan terhadap pegawai yang bekerja di PT. Kereta Api Devisi Regional III Sumatera Selatan, yakni sebanyak 13 orang yang berhubungan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan, terdiri dari:

1. 1 orang manajer humas
2. 1 orang senior manajer sumber daya manusia
3. 1 orang senior manajer keuangan
4. 1 orang senior manajer sarana
5. 1 orang senior manajer jalan rel dan jembatan
6. 1 orang senior manajer sintelis
7. 1 orang senior manajer operasi
8. 1 orang senior manajer komersial
9. 1 orang senior manajer pelayanan
10. 1 orang manajer hukum
11. 1 orang manajer pengadaan barang dan jasa
12. 1 orang senior manajer pengamanan
13. 1 orang senior manajer sistem informasi

E. Data yang Diperlukan

Dilihat dari cara memperoleh datanya, data terdiri dari dua jenis:

1. Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).

2. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan catat oleh orang lain (Nur, 2002: 146).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari perusahaan yang berkaitan dengan penerapan *good corporate governance*, diantaranya adalah:

a. Gambaran umum tentang struktur organisasi
b. Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*
c. Jumlah karyawan

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan terdiri dari:

1. Kuesioner (angket)

   Kuesioner atau angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain bersedia memberikan respon (responden) sesuai dengan permintaan pengguna.

2. Wawancara

   Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.

3. Pengamatan

   Pengamatan (observasi) adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan dilakukan.

4. Test *(test)*

   Tes sebagai instrument pengumpulan data adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.

5. Dokumentasi

   Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian (Riduwan, 2003: 21)

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner (angket), wawancara, dan dokumentasi.

G. Analisis Data dan Teknik Analisis

Metode analisis data terdiri dari

1. Analisis kualitatif

   Analisis kualitatif adalah suatu metode analisis data yang diukur dengan cara memberikan penjelasan dalam bentuk kata-kata atau dalam bentuk kalimat.

2. Analisis kuantitatif

   Analisis kuantitatif adalah suatu metode analisis data yang diukur dalam suatu skala numeric atau angka (Mudarajat, 2003: 124).

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni analisis kualitatif. Teknik analisis pada penelitian ini yakni penulis menjelaskan tentang fenomena masalah yang ada pada PT. Kereta Api kemudian dihubungkan dengan beberapa teori.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum PT. Kereta Api Devisi III Sumatera Selatan

Sejarah perkembangan kereta api Indonesia telah dimulai sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda dengan membangun jalan kereta api yang pertama dari semarang Kedu dan seterusnya pada tahun 1842-1862 dengan surat keputusan Raja Belanda 28 maei 1842 Nomor 270. Di Sumatera Selatan sendiri pada zaman Hindia Belanda dikenal dengan zaman Zuice Sumatera Spoorwagen (ZSS), awal mulanya pembuatan jaringan kereta api di Sumatera Selatan telah ada sejak tahun 1895. Pada tahun 1908-1910 dipimpin Ir. Van Der Woorden, pemasangan rel jurusan Teluk Belitung-Tanjung Karang-Prabumulih dan Kertapati-Muara enim, serta dilanjutkannya jalur Muara Enim-Lahat dan Tebing Tinggi.

Pada tahun 1913 dilakukan percobaan kereta api untuk rute Teluk Betung-Geruntung pada tahun 1914 dibuka rute Kertapati-Muara Enim-Tanjung Enim. Pada tahun 1920 dibuka lintang Prabumulih-Baturaja-Muara Enim-Lahat dan pada tahun 1927 dibuka rute Negara Ratu (Baturaja)-Martapura. Pada tahun 1928 dibuka juga rute Baturaja-Tanjung Karang. Dengan demikian terbukalah hubungan natra Palembang dengan daerah-daerah lainnya.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG PERPUSTAKAAN

Pada bulan maret 1942 Jawa dan Sumatera dikuasai Jepang dan kereta api pun dikuasai oleh angkatan laut jepang (KAIGUN). Adapun sejarah perkembangan perkeretaapian di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Pada tanggal 28 September 1945 setelah indonesi merdeka, maka kereta api diambil alih oleh pemerintah Indonesia dengan nama DKA RI (Djawatan Kereta Api).
b. Pada tahun 1963 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22/1963 tanggal 22 mei 1963, maka status djawatan kereta api menjadi PNK (Perusahaan Negara Kereta Api).
c. Berdasarkan pasal 5 ayat 2 undang-undang dasar 1945 dan undang-undang nomor 19 tahun 1969 serta lembaran Negara nomor 40 tahun 1969 (Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1971) mulai September 1971, maka status PNKA berubah menjadi PERJAN (Perusahaan Jawatan Kereta Api).
d. Pada tahun 1990, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 57 tahun 1990, maka status perusahaan jawatan berubah menjadi PERUMKA (Perusahaan Umum Kereta Api). Dengan tujuan disamping memberikan pelayanan umum kepada masyarakat juga untuk memupuk keuntungan bagi pemerintah. Perkeretaapian Indonesia terus mengalami perubahan bentuk organisasi untuk menuju perbaikan.
e. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1998 PERUMKA berubah menjadi Persero. Khirnya berdirilah PR. Kereta Api (Persero) dengan akte notaris Imas Fatimah SH Nomor 2 tanggal 1 juni tahun 1999.

2. Visi dan misi PT. Kereta Api

Visi perusahaan adalah menjadi penyedia jasa perkeretaapian terbaik yang memenuhi harapan *stakeholders.*

Misi perusahaan adalah menyelenggarakan prasarana dan sarana perkeretaapian berikut bisnis penunjangnya, melalui praktek bisnis terbaik untuk memberikan nilai tambah yang tinggi bagi *stakeholders* dan kelestarian lingkungan.

3. Struktur Organisasi

Pada dasarnya suatu organisasi memerlukan pengelolaan yang memadai untuk menunjang tercapainya tujuan organisasi, maka diperlukan adanya struktur organisasi. Struktur organisasi PT. Kereta Api Devisi Regional III Sumatera Sealatan adlah sebagai berikut:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DIVISI REGIONAL III SUMATERA SELATAN

LAMPIRAN : II.3.A
SK DIREKSI PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
NOMOR : KEP.U/OT.003/II/ 5 /KA-2011
TANGGAL : 26 JANUARI 2011

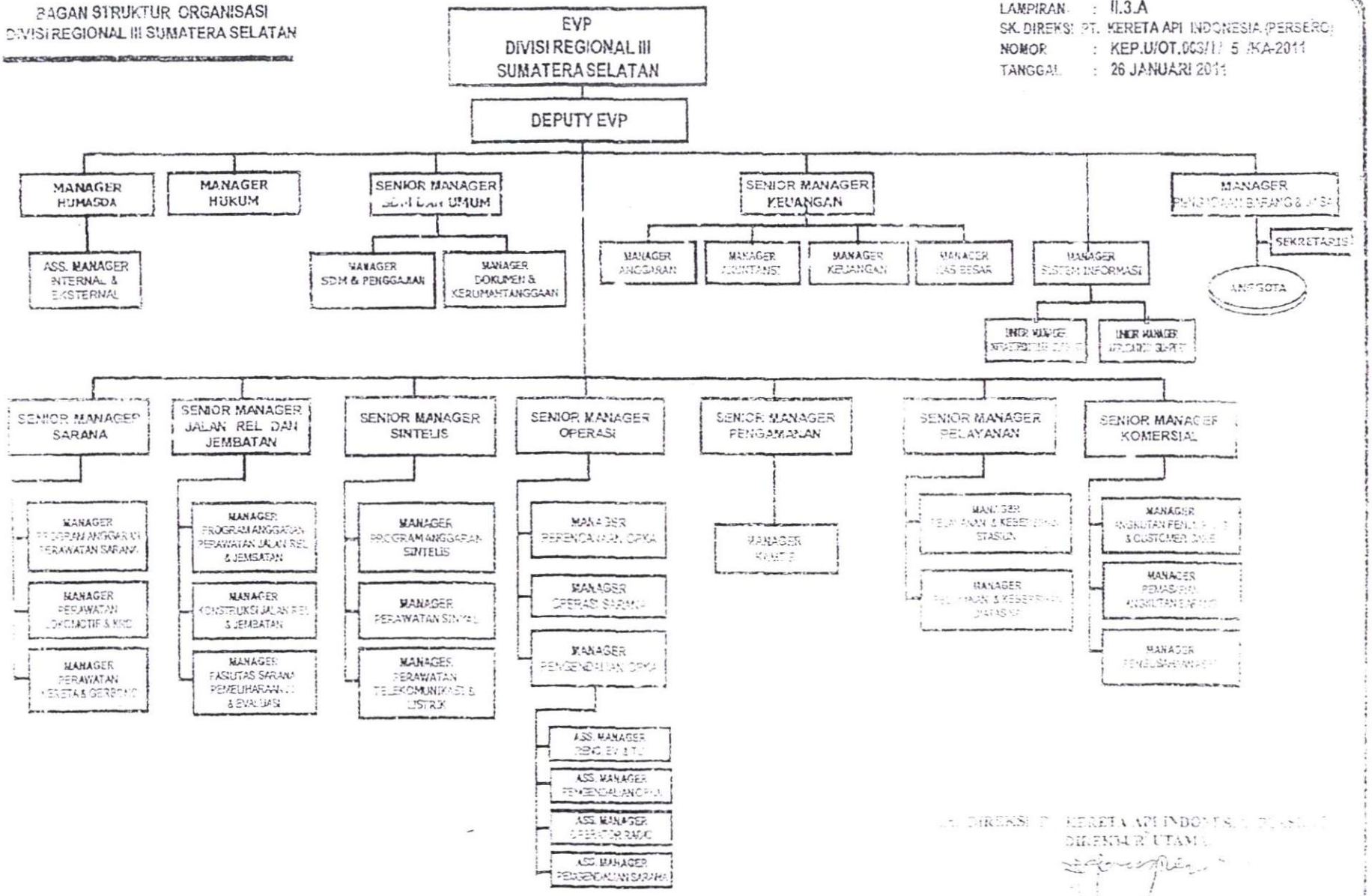

DIREKSI PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DIREKTUR UTAMA

IGNASIUS JONAN
NIPP. 63621

4. Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi pada PT. Kereta Api Devisi Regional III Sumatera Selatan

a. Devisi Regional III Sumatera Selatan adalah satuan organisasi di lingkungan PT. Kereta Api (persero) dan berkedudukan di Palembang.

b. Devisi regional III Sumatera Selatan dipimpin oleh seorang kepala Devisi Regional yang berada dibawah dan tanggung jawab kepala direksi.

Devisi Regional III Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengusahaan angkutan kereta api, merumuskan, merencanakan dan mengendalikan program angkutan penumpang dan barang. Serta program pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana di wilayah devisi regional III Sumatera Selatan.

Devisi Regional III Sumatera Selatan mempunyai fungsi:

a. Pengelolaan dan evaluasi kinerja Sumber Daya Alam (SDM), pendayagunaan keuangan, anggaran dan akuntansi, kerumahtanggan, atau umum dan hukum, serta administrasi kas besar.

b. Pelaksanaan pengujian dan pengendalian perusahaan, kesehatan (HIPERKES), evaluasi kinerja unit pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja.

c. Pelaksanaan hubungan masyarakat

d. Pembinaan, perencanaan dan pengendalian program, serta evaluasi kinerja pemeliharaan jalan rel, jembatan, peralatan mekanik, tanah dan bangunan.

e. Pembinaan, perencanaan dan pengendalian program, serta evaluasi kinerja pendayagunaan dan pemeliharaan sarana.

f. Pembinaan, perencanaan dan pengendalian program, serta evaluasi kinerja pengusahaan operasi dan pemasaran angkutan kereta api.

g. Pembinaan, perencanaan dan pengendalian program, serta evaluasi kinerja pemeliharaan sinyal, telekomunikasi dan listrik.

h. Pelaksanaaan pemeliharaan dan perbaikan sarana

i. Pelaksanaan pergudangan dan logistik

j. Pengusahaan angkutan kereta api

Devisi Regional II Sumatera Selatan terdiri dari :

1. Bagian Administrasi

Bagian administrasi mempunyai tugas pokok merumuskan dan menyusun program pengelolaan dan evaluasi kinerja sumber daya manusia (SDM), pendayagunaan keuangan, penyusunan rencana kerja anggaran devisi dan akuntansi, kerumahtanggan/umum dan hukum, serta administrasi kas besar.

Untuk melaksanakan tugas pokok , bagian administrasi mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan pengelolaan dan evaluasi kinerja SDM

b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan pengesahan pembayaran.

c. Penyusunan rencana kerja anggaran tahunan devisi dan pengelolaan administrasi anggaran dan akuntansi

d. Pelaksanaan administrasi umum/kerumahtanggan dan hukum

e. Pelaksanaan administrasi kas besar

Bagian administrasi terdiri dari:

1) Seksi sumber daya manusia (SDM)
2) Seksi pendayagunaan keuangan
3) Seksi anggaran dan hukum
4) Seksi kerumahtanggan/umum dan hukum
5) Seksi kas besar

2. Bagian Hiperkes dan Keselamatan Kerja

Bagian HIPERKES dan keselamatan kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan penelitian, pengujian dan pembinaan hygiene perusahaan, kesehatan lingkungan kerja dan keselamatan kerja. Melaksanakan pengendalian, pembinaan dan evaluasi kinerja unit pelayanan kesehatan di wilayah devisi regional III Sumatera Sealatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, HIPERKES dan keselamatan kerja mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan penelitian, pengujian dan pembinaan perusahaan dan kesehatan linglkungan kerja, economic dan psikologi kerja, serta melaksanakan evaluasi kinerja unit pelayanan kesehatan
b. Pelaksanaan pelatihan dan pemberian bantuan teknisi kegiatan keselamatan dan perlindungan kerja.

Bagian HIPERKES dan keselamatan kerja terdiri dari:

1) Seksi HIPERKES
2) Seksi keselamatan kerja

3. Seksi Hubungan Masyarakat (HUMAS)

Seksi humas mempunyai tugas pokok melaksanakan hubungan masyarakat, penyuluhan di lingkungan perusahaan (internal), serta hubungan mastyarakat diluar perusahaan.

4. Bidang Jalan Rel, Jembatan, Tanah dan Bangunan

Bidang jalan rel, jembatan, tanah dan bangunan mempunyai tugas pokok merumuskan, merencanakan dan mengendalikan program pemeliharaan jalan rel, sepur simpang, jembatan, tanah dan bangunan, serta mengevaluasi kinerja pendayagunaan dan pemeliharaan jalan rel, jembatan, tanah dan bangunan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, bidang jalan rel, jembatan, tanah dan bangunan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program anggaran dan evaluasi kinerja pemeliharaan rel, jembatan, tanah dan bangunana.
b. Penyusunan program pemeliharaan jalan rel dan sepur simpang
c. Penyusunan program pemeliharaan jembatan
d. Pengendalian pemeliharaan, inventarisasi dan pendayagunaan tanah dan bangunana
e. Pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan mesin berat dan mesin ringan dan falidalitas pemeliharaan jalan rel

Bidang jalan rel, jembatan, tanah dan bangunan terdiri dari:

1) Seksi program
2) Seksi jalan rel

3) Seksi jembatan

4) Seksi tanah dan bangunan

5) UPT Depo mekanik prabumulih

5. Bidang Sarana

Bidang saran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program dan evaluasi kinerja pemeliharaan, perbaikan dan pendayagunaan sarana.

Untuk melaksanakan tugas, bidang sarana mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program anggaran dan evaluasi kinerja pemeliharaan perbaikan dan pendayagunaan sarana
b. Penyusunan program pemeliharaan, perbaikan dan pendayagunaan lokomotif dan kereta rel diesel (KRD), serta kelayakannya.
c. Penyusunan program pemeliharaan, perbaikan dan pendayagunaan kereta dan gerbong serta jaminan kelayakannya.

Bidang sarana terdiri dari:

1) Seksi program

2) Seksi lokomotid dan KRD

3) Seksi kereta api dan gerbong

6. Bidang operasi dan pemasaran

Bidang operasi dan pemasaran mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengendalian, evaluasi kinerja operasi dan pemasaran angkutan penumpang barang.

Untuk melaksanakan tugas pokok, bidang operasi dan pemasaran mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program pendapatan biaya kegiatan operasi dan pemasaran jasa angkutan penumpang dan barang, pembuatan grafik perjalanan kereta api (GAPEKA), serta melaksanakan pembinaan penjualan jasa angkutan.
b. Penyusunan program pembinaan teknis operasi kereta api dan melaksanakan pengendalian operasi kereta api secara terpusat serta perencanaan pengendalian keamanan dan ketertiban dia atas kereta api dan dilingkungan devisi
c. Pelaksanaan pemasaran angkutan penumpang dan barang, menganalisis dan negosiasi tarif, menganalisis keluhan penguna jasa, serta bina pelanggan.
d. Penyiapa ketertiban operasi kereta dan gerbong, serta melksanaan pelayanan operasi sarana telekomunkasi (telegram).

Bidang operasi dan pemasaran terdiri dari:

1) Seksi program perjalanan kereta api
2) Seksi operasi kereta api dan pengamanan
3) Seksi pemasaran dan bina pelanggan
4) Seksi operasi teknis dan telegram.

7. Bidang Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik

Bidang sinyal telekomunikasi dan listrik mempunyai tugas pokok merumuskan, merencanakan dan mengendalikan program pemeliharaan

sinyal, telekomunikasi dan listrik, serta mengevaluasi kinerja pemeliharaan dan pendayagunaan sinyal, telekomunikasi dan listrik.

Untuk melaksanakan tugas pokok, bidang sinyal telekomuniksi dan listrik mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program anggaran pemeliharaan sinyal telekomunikasi dan listrik.
b. Penyusunan program pemeliharaan sinyal
c. Penyusunan program pemeliharaan telekomunikasi dan listrik.

Bidang sinyal, telekomunikasi dan listrik terdiri dari:

1) Seksi program
2) Seksi sinyal
3) Seksi telekomunikasi dan listrik

8. Bagian UPT Yasa Sarana Lahat

UPT balai yasa sarana lahat mempunyai tugas melaksanakan rencana program pemeliharaan dan perbaikan lokomotif, kereta rel diesel (KRD), kereta dan gerbong serta melaksanakan pembinaan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi kerumahtanggan dan umum.

Untuk melaksanakan tugas pokok, UPT balai yasa sarana lahat mempunyai tugas fungsi:

a. Pelaksanaan administrasi sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggan dan umum

UPT gudang persediaan lahat terdiri dari:

1) Sub urusan administrasi gudang persediaan
2) Sub urusan penerimaan, penyaluran dan pendistribusian
3) Sub urusan penyimpanan persediaan gudang los I
4) Sub urusan penyimpanan persediaan gudang los II
5) Sub urusan penyimpanan persediaan gudang los III

10. Bagian Sub Devisi Regional III.1 Kertapati

Sub devisi regional III.1 kertapati mempunyai tugas pokok melaksanakan pengusahaan angkutan kereta api, merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan angkutan penumpang dan barang, serta program pemeliharaan perbaikan sarana dan prasarana di sub devisi regional III.1 kertapati.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, sub devisi regional III1 kertapati mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan pengelolaan dan evaluasi kinerja sumber daya manusia (SDM), pendayagunaan keuangan dan pelaksanaan administrasi kerumahtanggan dan umum.
b. Pelaksanaan pengujian dan pengendalian hygiene perusahaan, kesehatan (HIPERKES), evaluasi kinerja unit pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja.
c. Pemeriksaan kas daerah
d. Pelaksanaan keamanan dan ketertiban
e. Pelaksanaan dan evaluasi kinerja pemeliharaan jalan rel dan jembatan

f. Pelaksanaan dan evaluasi kinerja pendayagunaan sarana

g. Pelaksanaan dan evaluasi kinerja operasi dn pelayanan

h. Pelaksanaan dan evaluasi kinerja pemeliharaan sinyal, telekomunikasi dan listrik.

i. Pemeliharaan dan evaluasi kinerja tanah dan bangunan.

Sub devisi regional III.1 kertapati terdiri dari:

1) Seksi administrasi

2) Seksi HIPERKES dan keselamatan kerja

3) Pemeriksaan kas daerah

4) Urusan keamanan dan ketertiban

5) Seksi jalan rel dan jembatan

6) Seksi sarana

7) Seksi operasi dan pemasaran

8) Seksi sinyal, telekomunikasi dan listrik

9) Seksi tanah dan bangunan

11. Bagian Sub Devisi Regional III.2 Tanjung Karang

Sub devisi regional III.2 Tanjung karang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengusahaan angkutan kereta api, merumuskan, merencanakan, dan mengendalikan angkutan penumpang dan barang, serta program pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana di wilayah sub devisi regional III.2 Tanjung karang.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, sub devisi regional III.2 Tanjung karang mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan pengelolaan dan evaluasi kinerja sumber daya manusia (SDM), pendayagunaan keuangan, pelaksanaan kerumahtanggan dan administrasi umum.
b. Pelaksanaan penelitian, pengujian dan pembinaan hygiene perusahaan, kesehatan lingkungan kerja dan keselamatan kerja.
c. Pemeriksaan kas daerah
d. Pelaksanaan hubungan masyarakat
e. Pelaksanaan kleamanan dan ketertiban
f. Pelaksanaan pemeliharaan jalan rel dan jembatan
g. Pelaksanaan pendayagunan sarana
h. Pelaksanaan dan pengendalian operasi dan pelayanan
i. Pelaksanaan pemeliharaan dan pengendalian sinyal, telekomunikasi dan listrik
j. Pemeliharaan dan pengendalian tanah dan bangunan.

Sub devisi regional III.2 Tanjung karang terdiri dari:

1) Seksi administrasi
2) Seksi HIPERKES dan keselamatan kerja
3) Pemeriksaan kas daerah
4) Hubungan masyarakat
5) Urusan keamanan dan ketertiban
6) Seksi jalan rel dan jembatan

7) Seksi sarana

8) Seksi operasi dan pemasaran

9) Seksi sinyal, telekomunikasi dan listrik

10) Seksi tanah dan bangunan

2. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Kereta Api Devisi Regional III Sumatera Selatan dengan populasi sebanyak 13 orang, yang terdiri dari 1 orang manajer humas, 1 orang senior manajer sumber daya manusia, 1 orang senior manajer keuangan, 1 orang senior manajer sarana, 1 orang senior manajer jalan rel dan jembatan, 1 orang senior manajer sintelis, 1 orang senior manajer operasi, 1 orang senior manajer komersial, 1 orang senior manajer pelayanan, 1 orang manajer hukum, 1 orang manajer pengadaan barang dan jasa, 1 orang senior manajer pengamanan, 1 orang senior manajer sistem informasi. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* serta melihat penyebab tidak terlaksananya dengan baik prinsip-prinsip *good corporate governance* pada PT. Kereta Api. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa orang-orang yang langsung berkaitan dengan kegiatan operasional pada PT. Kereta Api Devisi Regional III Sumatera Selatan masih ada sebagaian yang masih belum mengerti tentang pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Selain itu, pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* masih sangat rendah, yang pembahasannya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Informasi umum mengenai *good corporate governance*

Pemahaman atau pengetahuan dari masing-masing karyawan mengenai pelaksanaaan prinsip-prinsip *good corporate governance*, yang terdiri dari prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta kewajaran. Dapat diketahui bahwa seluruh responden telah mengerti dengan sistem tata kelola perusahaan *good corporate governance*. Selain itu, kelima prinsip *good corporate governance* telah diterapkan dalam PT. Kereta Api Devisi Regional III Sumatera Sealatan. Penjelasan lebih lengkap mengenai hasil jawaban responden tentang prinsip-prinsip *good corporate governance* dapat dilihat pada lampiran 2.

b. Prinsip Transparansi *(Transparency)*

Mengenai pelaksanaan prinsip transparansi *(transparency)*, diperoleh bahwa pemahaman responden tentang pengertian transparansi *(transparancy)* adalah sebanyak 10 orang atau 77% dari jumlah sampel yang mengerti tentang prinsip transparansi, sisanya sebanyak 3 orang atau 23% yang tidak mengerti prinsip transparansi. Responden yang menyatakan informasi disediakan secara tepat waktu adalah sebanyak 13 orang atau 100% dari jumlah sampel, yang menyatakan informasi tidak disediakan secara tepat waktu tidak ada.

Responden yang menyatakan informasi disediakan secara memadai (memenuhi kebutuhan para *stakeholders*) adalah sebanyak 13 orang atau 100% dari jumlah sampel, yang menyatakan informasi tidak disediakan secara memadai (memenuhi kebutuhan para *stakeholders*) tidak ada. Responden yang menyatakan

informasi disediakan secara jelas adalah 13 orang atau 100% dari jumlah sampel, yang menyatakan informasi tidak disediakan secara jelas tidak ada.

Responden yang menyatakan informasi disediakan secara akurat dan dapat diperbandingkan adalah sebanyak 13 orang atau 100% dari jumlah sampel, yang menyatakan informasi tidak disediakan secara akurat dan dapat diperbandingkan tidak ada. Responden yang menyatakan informasi mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya adalah sebanyak 11 orang atau 85% dari jumlah sampel, yang menyatakan informasi tidak mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya adalah sebanyak 2 orang atau 15% dari jumlah sampel.

Informasi yang disajikan oleh PT. Kereta Api yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan hanya tentang visi, misi, sasaran usaha, strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus. Pemegang saham pengendali, kepemilikan saham atau anggota direksi serta anggota dewan komisaris, sistem dalam pelaksanaan *good corporate governance* serta tingkat kepatuhannya, serta kejadian kepentingan yang dapat mempengaruhi perusahaan. Responden yang menyatakan dengan adanya prinsip keterbukaan akan mengurangi rahasia perusahaan adalah sebanyak 9 orang atau 69% dari jumlah sampel, yang tidak akan mengurangi rahasia perusahaan adalah sebanyak 4 orang atau 31% dari jumlah sampel. Responden yang menyatakan kebijakan perusahaan telah dinyatakan secara tertulis adalah sebanyak 13 orang atau 100% dari jumlah sampel, yang tidak dinyatakan secara tertulis tidak ada. Responden yang menyatakan bahwa kebijakan perusahaan telah dikomunikasikan kepada

pemangku kepentingan sebanyak 13 orang atau 100% dari jumlah sampel, responden yang kebijakan perusahaan tidak dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan tidak ada. Penjelasan lebih lengkap mengenai hasil jawaban responden tentang prinsip-prinsip *good corporate governance* dapat dilihat pada lampiran 2.

c. Prinsip Akuntabilitas *(Accountability)*

Mengenai prinsip akuntabilitas *(Accountability)* diperoleh bahwa pemahaman mengenai akuntabilitas *(accountability)* adalah sebanyak 10 orang atau 77% dari jumlah sampel yang mengerti tentang prinsip akuntabilitas, sisanya sebanyak 3 orang atau 23% yang tidak mengerti prinsip akuntabilitas. Responden akan menyatakan bahwa perusahaan telah menetapkan rincian tugas masing-masing karyawan secara jelas adalah sebanyak 13 orang atau 100% dari jumlah sampel, yang tidak menetapkan rincian tugas masing-masing karyawan secara jelas tidak ada.

Responden yang menyatakan bahwa perusahaan telah menetapkan rincian tanggungjawab masing-masing karyawan secara jelas adalah sebanyak 13 orang atau 100% dari jumlah sampel, yang tidak menetapkan rincian dan tanggungjawab masing-masing karyawan secara jelas tidak ada. Responden yang menyatakan bahwa perusahaan telah memiliki suatu keyakinan bahwa semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggungjawab dan peranannya dalam pelaksanaan *good corporate governance* adalah sebanyak 11 orang atau 85% dari jumlah sampel, yang tidak memiliki suatu keyakinan bahwa

semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggungjawab dan perannya dalam pelaksanaan *good corporate governance* adalah sebanyak 2 orang atau 15% dari jumlah sampel.

Responden yang menyatakan bahwa perusahaan telah memiliki sistem pengendalian internal adalah sebanyak 13 orang atau 100% dari jumlah sampel, yang tidak memiliki sistem pengendalian internal tidak ada. Responden yang menyatakan bahwa perusahaan telah memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran karyawan perusahaan adalah sebanyak 13 orang atau 100% dari jumlah sampel, yang tidak memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran karyawan perusahaan tidak ada.

Responden yang menyatakan bahwa perusahaan telah memeiliki sistem penghargaan *(reward)* dan sanksi *(punishment)* adalah sebnyak 13 orang atau 100% dari jumlah sampel, yang tidak memiliki sistem penghargaan *(reward)* dan sanksi *(punishment)* tidak ada. Responden yang menyatakan bahwa perusahaan telah membuat etika bisnis atas dasar kesepakatan bersama adalah sebanyak 13 orang atau 100% dari jumlah sampel, yang tidak membuat etika bisnis atas dasar kesepakatan bersama tidak ada. Responden yang menyatakan bahwa dalam menyelesaikan tugasnya, setiap karyawan telah berpegang pada etika bisnis yang telah disepakati adalah sebnyak 13 orang atau 100% dari jumlah sampel, yang tidak berpegang pada etika bisnis yang telah disepakati tidak ada.

Responden yang menyatakan bahwa perusahaan telah, membuat pedoman perilaku *(code of product)* atas dasar kesepakatan bersama adalah sebanyak 13 orang atau 100% dari jumlah sampel, yang tidak membuat pedoman perilaku

(code of product) atas dasar kesepakatan bersama tidak ada. Responden yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, setiap karyawan telah berpegang pada pedoman perilaku *(code of product)* yang telah disepakati adalah sebanyak 7 orang atau 54% dari jumlah sampel, yang tidak berpegang pada pedoman perilaku *(code of product)* yang telah disepakati adalah sebnayak 6 orang atau 46% dari jumlah sampel. Penjelasan lebih lengkap mengenai hasil jawaban responden tentang prinsip-prinsip *good corporate governance* dapat dilihat pada lampiran 2.

d. Prinsip Pertanggungjawaban *(Responsibility)*

Mengenai pelaksanaan prinsip pertanggungjawaban *(responsibility)* diperoleh bahwa pemahaman responden mengenai pengertian pertanggungjawaban *(responsibility)* adalah sebanyak 9 orang atau 69% dari jumlah sampel yang mengerti tentang prinsip pertanggungjawaban, sisanya sebanyak 4 orang atau 31% yang tidak mengerti prinsip pertanggungjawaban. Responden yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, setiap karyawan telah berpegang pada prinsip kehati-hatian adalah sebanyak 13 orang atau 100% dari jumlah sampel, yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, setiap karyawan tidak berpegang pada prinsip kehati-hatian tidak ada.

Responden yang menyatakan bahwa perusahaan telah mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan *(by-laws)* adalah sebanyak 13 orang atau 100% dari jumlah sampel, yang menyatakan bahwa perusahaan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan

peraturan perusahaan *(by-laws)* tidak ada. Responden yang menyatakan bahwa bahwa perusahaan telah membuat perencanaan mengenai tanggungjawab sosial (peduli pada masyarakat dan lingkungan sekitar) adalah sebanyak 13 orang atau 100% dari jumlah sampel, yang tidak membuat perencanaan mengenai tanggungjawab sosial (peduli pada masyarakat dan lingkungan sekitar) tidak ada. Responden yang menyatakan bahwa perusahaan pernah melaksanakan tanggungjawab sosial (peduli pada masyarakat dan lingkungan sekitar) adalah sebanyak 13 orang atau 100% dari jumlah sampel, yang tidak pernah melaksanakan tanggungjawab sosial (peduli pada masyarakat dan lingkungan sekitar) tidak ada.

e. Prinsip Kemandirian *(Independency)*

Mengenai pelaksanaan prinsip kemandirian *(independency)* diperoleh bahwa pemahaman responden tentang pengertian kemandirian *(independency)* adalah sebanyak 7 orang atau 54% dari jumlah sampel yang mengerti tentang prinsip kemandirian, sisanya sebanyak 6 orang atau 46% yang tidak mengerti tentang prinsip kemandirian. Responden yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing karyawan telah terhindar dari dominasi oleh pihak lain adalah sebanyak 13 orang atau 100%, yang tidak terhindar dari dominasi oleh pihak lain tidak ada. Responden yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing karyawan telah terhindar dari pengaruh oleh kepentingan tertentu adalah sebanyak 13 orang atau 100%, yang tidak terhindar dari pengaruh oleh kepentingan tertentu tidak ada. Responden yang

menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing karyawan telah bebas dari benturan kepentingan dan segala pengaruh atau tekanan dari pihak lain adalah sebanyak 12 orang atau 92%, yang tidak bebas dari benturan kepentingan dan segala pengaruh atau tekanan dari pihak lain adalah sebanyak 1 orang atau 8% dari jumlah sampel.

Responden yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing karyawan telah melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan adalah sebanyak 13 orang atau 100%, yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan tidak ada. Responden yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing karyawan mendominasi/melempar tanggungjawab antar satu dengan yang lain adalah sebanyak 9 orang atau 69%, yang tidak mendominasi/melempar tanggungjawab antara satu dengan yang lain adalah sebanyak 4 orang atau 31%. Penjelasan lebih lengkap mengenai hasil jawaban responden tentang prinsip-prinsip *good corporate governance* dapat dilihat pada lampiran 2.

f. Prinsip Kewajaran *(Fairness)*

Mengenai pelaksanaan prinsip kesetaraan dan kewajaran *(fairness)* diperoleh bahwa responden yang paham tentang pengertian prinsip kesetaraan dan kewajaran *(fairness)* sebanyak 7 orang atau 54% dari jumlah sampel, yang tidak memahami mengenai pelaksanaan prinsip kesetaraan dan kewajaran adalah sebanyak 6 orang atau 46%. Responden yang menyatakan bahwa dalam kegiatan

rapat perusahaan telah memberikan kesempatan pada pemangku kepentingan untuk menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan adalah sebanyak 13 orang atau 100%, yang tidak memberikan kesempatan pada pemangku kepentingan untuk menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan tidak ada.

Responden yang menyatakan bahwa dalam kegiatan rapat perusahan telah memberikan kesempatan pada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan bagi kepentingan perusahaan adalah sebanyak 13 orang atau 100%, yang tidak memberikan kesempatan pada pemangku kepentingan untuk menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan tidak ada. Responden yang menyatakan bahwa perusahaan telah membuka akses atas informasi untuk setiap pemangku kepentingan adalah sebanyak 13 oarang atau 100%, yang tidak membuka akses informasi untuk setiap pemangku kepentingan tidak ada. Responden yang menyatakan bahwa perusahaan telah memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan adalah sebanyak 13 orang atau 100%, yang tidak memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan tidak ada.

Responden yang menyatakan bahwa dalam sistem penerimaan karyawan, telah memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, jender, dan kondisi fisik adalah 13 orang atau 100%, yang tidak memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, jender, dan kondisi

fisik tidak ada. Responden yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, perusahaan telah memberikan kesempatan yang sama dengan tanpa membedakan suku, ras, jender, dan kondisi fisik adalah sebanyak 13 orang atau 100%, yang tidak membedakan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, ras, jender, dan kondisi fisik tidak ada.

Hasil jawaban responden mengenai prinsip-prinsip *good corporate governance*, meliputi transparansi *(transparency)*, kemandirian *(indepedency)*, akuntabilitas *(accountability)*, pertanggungjawaban *(responsibility)*, dan kewajaran *(fairness)* dapat dilihat pada lampiran 2. Berdasarkan hasil jawaban responden mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* secara keseluruhan dapat diketahui bahwa pada prinsip transaparansi *(transparency)*, responden yang mengetahui tentang pelaksanaan prinsip transparansi secara keseluruhan hanya 84%, sisanya sebanyak 16% tidak mengerti tentang pelaksanaan prinsip transparansi. Pada prinsip kemandirian *(independency)*, responden yang mengetahui pelaksanaan prinsip kemandirian secara keseluruhan 86%, sisanya sebanyak 14% tidak mengerti tentang pelaksanaan prinsip kemandirian.

Pada prinsip akuntabilitas *(accountability)*, responden yang mengetahui tentang pelaksanaan prinsip akuntabilitas secara keseluruhan hanya 92% sisanya sebanyak 8% tidak mengerti tentang pelaksanaan prinsip akuntabilitas. Pada prinsip pertanggungjawaban *(responsibility)*, responden yang mengetahui pelaksanaan prinsip pertanggungjawaban secara keseluruhan hanya 94%,. Sisanya

sebanyak 6% tidak mengerti tentang pelaksanaan prinsip pertanggungjawaban. Pada prinsip kewajaran *(fairness)*, responden yang mengetahui tentang pelaksanaan prinsip kewajaran secara keseluruhan hanya 93%, sisanya sebanyak 7% tidak mengerti tentang prinsip kewajaran.

B. PEMBAHASAN

1. *Good corporate governance*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih rendahnya pemahan dari PT. Kereta Api Devisi Regional III Sumatera Selatan mengenai prinsip-prinsip *good corporate governance*. Hal ini dapat dilihat dari pengetahuan yang dimiliki karyawan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance*, baik itu prinsip transparansi *(transparency)*, kemandirian *(independence)*, akuntabilitas *(accountability)*, pertanggungjawaban *(responsibility)*, dan kewajaran *(fairness)*. Pelaksanaan prinsip *good corporate governance* pembahasannya diuraikan sebagai berikut:

a. Prinsip Transparansi *(Transparancy)*

Pada prinsip transparansi *(transparancy)* ini diketahui bahwa responden yang mengetahui hanya 84%, sisanya sebanyak 16% tidak mengerti tentang prinsip transparansi *(transparancy)* itu sendiri. Pelaksanaan prinsip transparansi *(transparancy)* yang tidak sesuai pada PT. kereta Api Devisi Regional III Sumatera Selatan dapat dilihat pada bidang keuangan yaitu prosedur pengeluaran biaya prosedurnya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh antara lain pertama, adanya informasi tidak disediakan secara

memadai (memenuhi kebutuhan para *stakeholders*). Kedua, dalam pemeriksaan buku kas, buku kas pembantu, dan bukti pendukung transaksi ditemukan pengelolaann administrasi belum optimal. Penjelasan lebih lengkap mengenai hasil jawaban responden tentang prinsip-prinsip *good corporate governance* dapat dilihat pada lampiran 2.

Tidak terlaksananya prinsip transparansi *(transparancy)* ini dapat berakibat buruk bagi PT. Kereta Api Devisi Regional III Sumatera Selatan. Akibat tidak dilaksanakannya prinsip transparansi *(transparency)* dengan baik adalah pertama, tidak tercapaianya objektifitas dalam menjalankan bisnis. Kedua, tidak dapat disediakannya informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

b. Prinsip Kemandirian *(independency)*

Pada prinsip kemandirian *(independency)*, responden yang mengetahui pelaksanaan prinsip kemandirian *(independency)* secara keseluruhan sebanyak 86%, sisanya sebanyak 14% tidak mengerti tentang pelaksanaan prinsip kemandirian. Pelaksanaan prinsip kemandirian *(independency)* yang tidak sesuai pada PT. Kereta Api Devisi Regional III Sumatera Selatan dapat dilihat pada bidang komersial,yaitu angkutan penumpang yang belum optimal. Penjelasan lebih lengkap mengenai hasil jawaban responden tentang prinsip-prinsip *good corporate governance* dapat dilihat pada lampiran 2.

Tidak dimengertinya prinsip kemandirian *(independency)* ini secara keseluruhan dapat berakibat buruk pada PT. Kereta Api yaitu terjadinya kegiatan

mendominasi pekerjaan dan dapat diintervensi pekerjaan oleh pihak lain, serta adanya pengaruh atau tekanan dari pihak lain. Akibatnya, seluruh tanggungjawab dan wewenang yang telah ditetapkan oleh perusahaan akan menjadi sia-sia. Hal yang demikian akan menyebabkan rangkap jabatan dan juga mengakibatkan saling lempar tanggungjawab dalam pekerjaan oleh satu karyawan atau bahkan lebih. Pemahaman karyawan mengenai prinsip kemandirian *(independency)* ini dapat ditingkatkan dengan cara melakukan seminar atau melakukan sosialisasi kepada para karyawan lewat *training* yang sebaiknya dilakukan oleh PT. Kereta Api itu sendiri.

c. Prinsip Akuntabilitas *(Accountability)*

Pada prinsip akuntabilitas *(accountability)*, responden yang mengetahui tentang pelaksanaan prinsip akuntabilitas *(accountability)* secara keseluruhan hanya 92%, sebanyak 8% tidak mengerti tentang pelaksanaan prinsip akuntabilitas. Dari hasil penelitian didapat bahwa telah lebih dari 50% dari jumlah sampel yang mengerti prinsip akuntabilitas *(accountability)*, tetapi hal ini masih belum dapat dikatakan bahwa seluruh karyawan yang bekerja pada PT. Kereta Api telah mengerti benar dengan prinsip akuntabilitas *(accountability)* itu sendiri.

Pelaksanaan prinsip akuntabilitas *(accountability)* yang tidak sesuai pada PT. Kereta Api dapat dilihat pada bidang operasional, Penjagaan pintu kereta api yang belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pada bidang sumber daya manusia, kegiatan yang tidak sesuai dengan pedoman pokok pelaksanaan prinsip akuntabilitas *(accountability)* yaitu pembagian tugas pegawai dan

pelaksanaannya belum lengkap dan belum semuanya memiliki surat keputusan fungsional. Pada bidang komersial, kegiatan yang tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan prinsip akuntabilitas *(accountability)* yaitu angkutan penumpang yang belum optimal.

Pelaksanaan prinsip akuntabilitas *(accountability)* ini belum sesuai dengan pedoman pokok pelaksanaan prinsip akuntabilitas *(accountability)* yang telah ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance*. Hal ini disebabkan oleh perusahaan tidak memiliki keyakinan bahwa semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggungjawab, dan peranannya dalam pelaksanaan *good corporate governance*.

Seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan tidak dapat dijelaskan secara transparan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara wajar oleh masing-masing karyawan. Hal ini dapat berdampak pada informasi yang disediakan oleh PT. Kereta Api Devisi Regional III Sumatera Selatan. Akibat dari tidak dilaksanakan dengan baik prinsip akuntabilitas yaitu informasi yang disediakan oleh pihak PT. Kereta Api kurang dijelaskan secara transparan, padahal informasi ini sangat berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan *(stakeholders)*.

Selain itu, pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab pekerjaan masih belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan prinsip akuntabilitas, yaitu adanya kejelasan fungsi pelaksanaan dan tanggungjawab dalam pengelolaan perusahaan. Tidak dilaksanakannya prinsip akuntabilitas *(accountability)* ini dapat berakibat

buruk bagi PT. Kereta Api yaitu perusahaan tidak dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.

Pelaksanaan prinsip akuntabilitas *(accountability)* yang sebaiknya diterapkan pada PT. Kereta Api adalah dengan berpedoman pada pelaksanaan asas dan prinsip akuntabilitas *(accountability)*. Selain itu, perusahan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan para pemegang saham yaitu pemegang saham memiliki wewenang dalam memberikan persetujuan tertulis terhadap pembuatan direksi yang diatur dalam anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan lainnyan, serta tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.

d. Prinsip Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Pada prinsip pertanggungjawaban *(responsibility)*, responden yang mengetahui pelaksanaan prisip pertanggungjawaban *(responsibility)* secara keseluruhan hanya 94%, sisanya sebanyak 6% tidak mengerti tentang pelaksanaan prinsip pertanggungjawaban *(responsibility)* itu sendiri. Pelaksanaan prinsip pertanggungjawaban *(responsibility)* yang tidak sesuai pada PT. Kereta Api dapat dilihat pada bidang operasional. Pertama, penjagaan pintu kereta api yang belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kedua, pelayanan pada setiap stasiun yang belum optimal. Pada bidang komersial, kegiatan yang tidak sesuai dengan pedoman pokok pelaksanaan prinsip pertanggungjawaban *(responsibility)* yaitu angkutan penumpang yang belum optimal.

Pada bidang sumber daya manusia, kegiatan yang tidak sesuai dengan pedoman pokok pelaksanaan prinsip pertanggungjawaban *(responsibility)* yaitu pembagian tugas pegawai dan pelaksanaannya belum lengkap dan belum semuanya memiliki surat keputusan fungsional. Pada bidang keuangan, kegiatan yang tidak sesuai dengan pedoman pokok pelaksanaan prinsip pertanggungjawaban *(responsibility)* yaitu pertama, prosedur pengeluaran biaya yang prosedurnya belum sesuai dengan ketentuan. Kedua, pengelolaan administrasi buku kas, buku pembantu kas dan bukti pendukung belum optimal.

e. Prinsip Kewajaran *(Fairness)*

Pada prinsip kewajaran *(fairness)*, responden yang mengetahui tentang pelaksanaan prinsip kewajaran *(fairness)* secara keseluruhan hanya 93%, sisanya sebanyak 7% tidak mengerti tentang prinsip kewajaran. Dari hasil penelitian didapat bahwa lebih dari 50% dari jumlah sampel yang mengerti akan prinsip kewajaran *(fairness)* itu sendiri, dalam hal ini masih belum dapat dikatakan bahwa seluruh karyawan yang bekerja pada PT. Kereta Api telah mengerti mengenai pelaksanaan prinsip kewajaran *(fairness)* itu sendiri.

Pemahaman mengenai prinsip kewajaran *(fairness)* masih rendah pada karyawan PT. Kereta Api Devisi Regional III Sumatera Selatan. Pelaksanaan prinsip kesetaraan dan kewajaran *(fairness)* yang tidak sesuai pada PT. Kereta Api dapat dilihat pada bidang operasional. Penjagaan pintu kereta api yang belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pada bidang komersial, kegiatan yang tidak sesuai dengan pedoman pokok pelaksanaan prinsip kewajaran

(fairness) yaitu angkutan penumpang yang belum optimal. Tidak dilaksanakannya prinsip kesetaraan dan kewajaran *(fairness)* ini secara keseluruhan dapat berakibat buruk bagi PT. Kereta Api yaitu kurangnya kepercayaan para pemangku kepentingan.

Dari uraian mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* yaitu transparansi *(transparency)*, kemandirian *(independecy)*, akuntabilitas *(accountability)*, pertanggungjawaban *(responsibility)* dan kewajaran *(fairness)*. Dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang menjadi penyebab pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* tidak dapat dilaksanakan dengan baik, antara lain:

Pada prinsip transparansi, informasinya perusahaan tidak mudah diakses oleh pemangku kepentingan yang sesuai dengan haknya. Kurang disediakannya informasi tentang strategi perusahaan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendalian, kepemilikan saham oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris, sistem manajemen resiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan *good corporate governance* serta tingkat kepatuhannya.

Pada pelaksanaan prinsip akuntabilitas *(accountability)*, pelaksanaannya tidak dapat dikerjakan dengan baik karena perusahaan tidak memiliki keyakinan bahwa semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggungjawab, dan perannya dalam pelaksanaan *good corporate governance*. Pada prinsip pertanggungjawaban, pelaksanaannya tidak dapat dikerjakan dengan

baik karena sebagian besar dari karyawan masih belum paham mengenai pengertian dari prinsip pertanggungjawaban.

Pada prinsip kemandirian *(independecy)*, pelaksanaannya idak dapat dikerjakan dengan baik karena sebagian karyawan yang kurang paham terhadap pengertian prinsip kemandirian *(independecy)*. Dalam melaksanakan tugasnya, sebagian karyawan mendominasi atau melempar tanggungjawab antara satu dengan lainnya. Pada prinsip kewajaran, pelaksanaannya tidak dapat dikerjakan dengan baik karena kurangnya pemahaman perusahaan mengenai pelaksanaan prinsip kesetaraan dan kewajaran *(fairness)*.

2. Kinerja

Tabel IV.1
Laporan Laba Rugi
PT. Kereta Api Devisi Regional III
Sumatera Selatan
Tahun 2006-2009

(Dalam Rupiah)

Nama Akun	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009
Pendapatan operasi				
- Pendapatan KA	42.515.023.775	45.649.678.615	52.846.293.439	47.447.827.770
- Pendapatan KA barang	795.012.183.283	758.351.965.693	1.079.892.283.296	1.253.617.596.320
- Pendapatan pendukung angkutan KA	-	-	575.041.425	117.881.065
Pendapatan Non Operasi	1.932.937.772	2.109.610.754	6.100.734.834	10.039.415.029
Pendapatan Operasi Lainnya	719.863.164	571.889.532	417.667.550	81.174.038
Total Pedapatan	**840.180.007.994**	**806.683.144.594**	**1.139.832.020.544**	**1.311.363.894.222**
Beban Operasi langsung	(324.183.885.520)	(367.371.724.274)	(468.861.380.946)	(569.196.342.987)
Beban Operasi Tidak Langsung	(103.145.571.948)	(110.306.230.242)	(141.841.079.462)	(157.847.092.488)
Beban Usaha	(61.036.532.196)	(65.439.116.600)	(93.762.690.601)	(108.405.770.445)
Total Beban	**(448.365.989.664)**	**(543.117.071.116)**	**(704.465.351.009)**	**(835.449.206.020)**
LABA	**361.834.018.330**	**343.556.073.478**	**435.367.669.535**	**475.914.688.202**

Sumber : PT. Kereta Api Devisi Regional III Sumatera Selatan

Berdasarkan tabel IV.1 pada laporan laba rugi telah menunjukkan tingkat transparansi yang cukup baik dikarenakan pada akun-akun pendapatan dan beban lebih dijelaskan secara transparansi sehingga memudahkan para pemegang saham untuk mengakses laporan laba rugi perusahaan. Pada prinsip kemandirian data-data yang tersaji pada laporan laba rugi PT. Kereta Api Devisi Regional III Sumatera Selatan menyajikan data dengan jelas.

Pada prinsip akuntabilitas yang terjadi pada PT. Kereta Api Devisi Regional III Sumatera Selatan telah terlihat tingkat pendapatan tahun 2007 mengalami penurunan, sehingga mempengaruhi tingkat laba pada perusahaan. Dalam menyajikan laporan laba rugi harus disajikan sesuai dengan keadaan kondisi perusahaan, sehingga karyawan dapat mempertanggungjawabkan laporan laba rugi kepada pemegang saham, data-data yang disajikan telah memenuhi prinsip kewajaran, karena didukung dengan bukti yang kompeten.

Untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik, diharapkan dalam pelaksanaan kinerja pada PT. Kereta Api Devisi Regional III Sumatera Selatan harus sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance* agar dapat menghasilkan laba yang maksimal bagi perusahaan.

Hasil penelitian mengenai penerapan *good corporate governance* pada PT. Kereta Api Devisi Regional III Sumatera Selatan mendukung hasil penelitian dari Suci (2005) dan Dita (2007) yang menyimpulkan bahwa rendahnya pemahaman terhadap arti penting dan strategi penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* oleh pelaku bisnis dan kegiatan menyimpang terhadap prinsip-prinsip *good corporate governance* memberikan dampak yang merugikan

bagi perusahaan dan pemegang saham. Hasil penelitian ini tidak mendukung teori yang dikemukakan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance*.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan pemahaman dan uraian pada bab empat, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan *good corporate governance* dalam memperbaiki kinerja pada PT. Kereta Api Devisi Regional III Sumatera Selatan belum sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Hal ini dapat dilihat pada pelaksaaan prinsip-prinsip *good corporate governance* itu sendiri, meliputi prinsip transparansi *(transparency)*, kemandirian *(independence)*, akuntabilitas *(accountability)*, pertanggungjawaban *(responsibility)*, dan kewajaran *(fairness)*. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan para karyawan mengenai prisip-prinsip *good corporate governanve* itu sendiri.

B. SARAN

Bagi PT. Kereta Api (Persero) Devisi Regional III Sumatera Selatan, supaya dalam kegiatan operasinal perusahaan sebaiknya menerapkan *good corporate governance* secara konsisten dan menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* sesuai dengan prinsip-prinsip dan asas-asas *good corporate governance* yang telah ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance*.

DAFTAR PUSTAKA

Dita Paradita. 2007. Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan yang Termasuk Kelompok Sepuluh Besar Menurut *Corporate Governance* Perception Index (CGPI), **Jurnal Akuntansi dan Keuangan,** Volume 9, Nomor 2, November 2007.

Eddi Wibowo, Tomo HS, dan Hessel Nogi, S Tangkilisan. 2004. **Memahami *Good Corporate Governance*** dan ***Good Corporate Governance***, Penerbit YPAPI, Yogyakarta

Indra Bastian. 2000. **Akuntansi Sektor Publik di Indonesia**. Edisi pertama. Penerbit BPFE, Yogyakarta

Johny Sudharmono. 2004. ***Good Governance Company.*** PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

Kunami. **Pedoman Umum *Good Corporate Governance***. Makalah (Online.http// www, publik brawijaya. ac.id). Diakses tanggal 10 Juni 2011.

Mudrajat Kuncoro. 2003. **Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi**, Erlangga, Jakarta.

Mulyadi. 2001. **Sistem Akuntansi**. Jakarta: Salemba Empat.

Nur Indiantoro dan B. Supomo. 2002. **Metodologi Penelitian untuk Akuntansi dan Manajemen**, BPFE, Yogyakarta.

Riduwan. 2003. **Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian**, Alfabeta, Bandung.

Siskie Permata. 2009. **Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan *Good Corporate Governance* Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kapten A.Rivai Palembang,** FE-UMP, Skripsi tidak dipublikasikan.

Suci Kumala Sarry. 2005. Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Tingkat Kesehatan Perbankan. **Jurnal Fordema**, Volume 5, Nomor 2, November 2005, halaman 1233-1245.

Sugiono. 2006. **Metodelogi Penelitian Bisnis**, Alfabeta, Bandung.

Wahyudin Zarkasyi. 2008. ***Good Corporate Governance*** **Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa keuangan Lainnya**, Edisi Pertama, Alfabeta, Bandung.

Lampiran 1

Penyimpangan Terhadap Prinsip-prinsip GCG

No.	PENYIMPANGAN	PRINSIP-PRINSIP GCG YANG BELUM OPTIMAL
	Bidang Operasional	
1.	Penjagaan pintu kereta api yang belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.	*Accountability* *Responsibility* *Fairness*
2.	Pelayanan pada satiap stasiun yang belum optimal	*Responsibility*
	Bidang SDM	
3.	Dalam pemeriksaan pembagian tugas pegawai dan pelaksanaannya ditemukan pembagian tugasnya belum lengkap dan belum semuanya dibekali SK fungsional.	*Accountability* *Responsibility*
	Bidang Keuangan	
4.	Dalam pemeriksaan buku kas ditemukan adanya pengeluaran biaya yang prosedurnya belum sesuai dengan ketentuan.	*Transparency* *Responsibility*
5.	Dalam pemeriksaan buku kas, buku kas pembantu, dan bukti pendukung transaksi ditemukan pengelolaan administrasi belum optimal.	*Transparency* *Responsibility*
	Bidang Komersial	
6.	Angkutan penumpang yang belum optimal	*Accountability* *Independency* *Responsibility* *Fairness*

Lampiran 2

Jawaban Responden Mengenai *Good Corporate Governance*

1. Jawaban Responden Tentang Informasi Umum *Good Corporate Governance*

No	Pertanyaan	Jawaban					
		Ya		Tidak		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Apakah anda :nengetahui sistem tata kelola perusahan *(Good Corporate Governance)*?	13	100%	-	-	13	100%
2	Apakah prinsip-prinsip *good corporate governance* telah dilaksanakan dalam perusahaan?	13	100%	-	-	13	100%
3	Transaparansi	13	100%	-	-	3	100%
	Akuntabilitas	13	100%	-	-	3	100%
	Pertanggungjawaban	13	100%	-	-	13	100%
	Kemandirian	13	100%	-	-	13	100%
	Kewajaran	13	100%	-	-	13	100%

Sumber: Hasil jawaban kuesioner, 2011

2. Jawaban Respoden Tentang Prinsip Transparansi *(Transparancy)*

No	Pertanyaan	Jawaban					
		Ya		Tidak		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Apakah anda mengetahui apa itu prinsip transparansi?	10	77%	3	23%	13	100%
2	Apakah perusahaan telah menyediakan informasi secara tepat waktu?	13	100%	-	-	13	100%
3	Apakah perusahaan telah menyediakan informasi secara memadai (*memenuhi* kebutuhan para *stakeholders*)?	13	100%	-	-	13	100%
4	Apakah perusahaan telah menyediakan informasi secara jelas?	13	100%	-	-	13	100%
5	Apakah perusahaan telah menyediakan informasi secara akurat dan dapat diperbandingkan?	13	100%	-	-	13	100%
6	Apakah informasi perusahaan dapat diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya?	11	85%	2	15%	13	100%
7	Visi	13	100%	-	-	13	100%
	Misi	13	100%	-	-	13	100%
	Sasaran usaha	10	77%	3	23%	13	100%
	Strategi perusahaan	7	54%	6	46%	13	100%
	Kondisi keuangan	13	100%	-	-	13	100%

	Susunan dan kompensasi pengurus	10	77%	3	23%	13	100%
	Pemegang saham pengendali	5	38%	8	62%	13	100%
	Kepemilikan saham direksi dan anggota dewan komisaris	5	38%	8	62%	13	100%
	Sistem manajemen resiko	9	69%	4	31%	13	100%
	Sistem pengawasan dan pengendalian internal	11	85%	2	15%	13	100%
	Sistem pelaksanaan *good corporate governance* serta tingkat kepatuhannya	12	92%	1	8%	13	100%
	Kejadian penting yang dapat mempengaruhi perusahaan	13	100%	-	-	13	
8	Apakah dengan adanya prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan, kerahasiaan perusahaan akan menjadi berkurang?	9	69%	4	31%	13	100%
9	Apakah kebijakan perusahaan telah dijelaskan secara tertulis?	13	100%	-	-	13	100%
10	Apakah kebijakan perusahaan telah dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan?	13	100%	-	-	13	100%
TOTAL		229	1761	44	339	273	2100

Sumber: Hasil jawaban kuesioner, 2011

3. Jawaban Responden Tentang Prinsip Akuntabilitas *(Accountability)*

No	Pertanyaan	Jawaban					
		Ya		Tidak		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Apakah anda mengetahui apa itu prinsip akuntabilitas?	10	77%	3	23%	13	100%
2	Apakah perusahaan menetapkan rincian tugas masing-masing karyawan perusahaan secara jelas?	13	100%	-	-	13	100%
3	Apakah perusahaan telah menetapkan rincian tanggungjawab masing-masing karyawan perusahaan secara jelas?	13	100%	-	-	13	100%
4	Apakah perusahaan telah memiliki suatu keyakinan	11	85%	2	15%	13	100%
5	Apakah perusahaan telah memiliki sistem pengendalian internal?	13	100%	-	-	13	100%
6	Apakah perusahaan telah memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran karyawan perusahaan?	13	100%	-	-	13	100%
7	Apakah perusahaan telah memiliki sistem	13	100%	-	-	13	100%

2. Jawaban Respoden Tentang Prinsip Transparansi *(Transparancy)*

No	Pertanyaan	Jawaban					
		Ya		Tidak		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Apakah anda mengetahui apa itu prinsip transparansi?	10	77%	3	23%	13	100%
2	Apakah perusahaan telah menyediakan informasi secara tepat waktu?	13	100%	-	-	13	100%
3	Apakah perusahaan telah menyediakan informasi secara memadai (*memenuhi* kebutuhan para *stakeholders*)?	13	100%	-	-	13	100%
4	Apakah perusahaan telah menyediakan informasi secara jelas?	13	100%	-	-	13	100%
5	Apakah perusahaan telah menyediakan informasi secara akurat dan dapat diperbandingkan?	13	100%	-	-	13	100%
6	Apakah informasi perusahaan dapat diakses oleh pemangku kepentingan *sesuai dengan* haknya?	11	85%	2	15%	13	100%
7	Visi	13	100%	-	-	13	100%
	Misi	13	100%	-	-	13	100%
	Sasaran usaha	10	77%	3	23%	13	100%
	Strategi perusahaan	7	54%	6	46%	13	100%
	Kondisi keuangan	13	100%	-	-	13	100%

	Susunan dan kompensasi pengurus	10	77%	3	23%	13	100%
	Pemegang saham pengendali	5	38%	8	62%	13	100%
	Kepemilikan saham direksi dan anggota dewan komisaris	5	38%	8	62%	13	100%
	Sistem manajemen resiko	9	69%	4	31%	13	100%
	Sistem pengawasan dan pengendalian internal	11	85%	2	15%	13	100%
	Sistem pelaksanaan *good corporate governance* serta tingkat kepatuhannya	12	92%	1	8%	13	100%
	Kejadian penting yang dapat mempengaruhi perusahaan	13	100%	-	-	13	
8	Apakah dengan adanya prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan, kerahasiaan perusahaan akan menjadi berkurang?	9	69%	4	31%	13	100%
9	Apakah kebijakan perusahaan telah dijelaskan secara tertulis?	13	100%	-	-	13	100%
10	Apakah kebijakan perusahaan telah dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan?	13	100%	-	-	13	100%
TOTAL		229	1761	44	339	273	2100

Sumber: Hasil jawaban kuesioner, 2011

3. Jawaban Responden Tentang Prinsip Akuntabilitas *(Accountability)*

No	Pertanyaan	Jawaban					
		Ya		Tidak		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Apakah anda mengetahui apa itu prinsip akuntabilitas?	10	77%	3	23%	13	100%
2	Apakah perusahaan menetapkan rincian tugas masing-masing karyawan perusahaan secara jelas?	13	100%	-	-	13	100%
3	Apakah perusahaan telah menetapkan rincian tanggungjawab masing-masing karyawan perusahaan secara jelas?	13	100%	-	-	13	100%
4	Apakah perusahaan telah memiliki suatu keyakinan	11	85%	2	15%	13	100%
5	Apakah perusahaan telah memiliki sistem pengendalian internal?	13	100%	-	-	13	100%
6	Apakah perusahaan telah memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran karyawan perusahaan?	13	100%	-	-	13	100%
7	Apakah perusahaan telah memiliki sistem	13	100%	-	-	13	100%

	penghargaan dan sanksi bagi karyawan?						
8	Apakah perusahaan telah membuat etika bisnis atas dasar kesepakatan bersama?	13	100%	-	-	13	100%
9	Apakah dalam melaksanakan tugasnya, setiap karyawan telah berpegang pada etika bisnis yang telah disepakati?	13	100%	-	-	13	100%
10	Apakah perusahaan telah membuat pedoman perilaku *(code of conduct)* atas dasar kesepakatan bersama?	13	100%	-	-	13	100%
11	Apakah dalam melaksanakan tugasnya setiap karyawan telah berpegang pada pedoman perilaku *(code of conduct)* yang telah disepakati?	7	54%	6	46%	13	100%
TOTAL		132	1016	11	84	143	1100

Sumber: Hasil jawaban kuesioner, 2011

4. Jawaban Responden Tentang Prinsip Pertanggungjawaban *(Responsibility)*

No	Pertanyaan	Jawaban					
		Ya		Tidak		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Apakah anda mengetahui apa itu prinsip pertanggungjawaban?	9	69%	4	31%	13	100%
2	Apakah dalam tugasnya, setiap karyawan berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian?	13	100%	-	-	13	100%
3	Apakah perusahaan telah mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan?	13	100%	-	-	13	100%
4	Apakah perusahaan telah membuat perencanaan mengenai tanggungjawab social (peduli masyarakat dan lingkungan sekitar)?	13	100%	-	-	13	100%
5	Apakah perusahaan pernah melaksanakan tanggungjawab sosial (peduli masyarakat dan lingkungan sekitar)?	13	100%	-	-	13	100%
TOTAL		61	469	4	31	65	500

Sumber: Hasil jawaban kuesioner, 2011

5. Jawaban Responden Tentang Prinsip Kemandirian *(Independency)*

No	Pertanyaan	Jawaban					
		Ya		Tidak		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Apakah anda mengetahui apa itu prinsip kemandirian?	7	54%	6	46%	13	100%
2	Apakah dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing karyawan telah terhindar dari dominasi oleh pihak lain?	13	100%	-	-	13	100%
3	Apakah dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing karyawan telah terhindar dari pengaruh oleh kepentingan tertentu?	13	100%	-	-	13	100%
4	Apakah dalam melaksanakan tugasnya, karyawan telah bebas dari benturan kepentingan dan segala pengaruh/tekanan dari pihak lain?	12	92%	1	8%	13	100%
5	Apakah dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing karyawan telah melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-	13	100%	-	-	13	100%

	undangan?						
6	Apakah dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing karyawan mendominasi atau melempar tanggungjawab antara satu dengan yang lain?	9	69%	4	31%	13	100%
TOTAL		67	515	11	85	78	600

Sumber: Hasil jawaban kuesioner, 2011

6. Jawaban Responden Tentang Prinsip Kewajaran *(Fairness)*

No	Pertanyaan	Jawaban					
		Ya		Tidak		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Apakah anda mengetahui apa itu prinsip kewajaran?	7	54%	6	46%	13	100%
2	Apakah perusahaan dalam kegiatan rapat telah memberikan kesempatan pada pemangku kepentingan untuk menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan?	13	100%	-	-	13	100%
3	Apakah perusahaan dalam kegiaan rapat telah memberikan kesempatan pada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan bagi kepentingan	13	100%	-	-	13	100%

	perusahaan?						
4	Apakah perusahaan telah membuka akses atas informasi untuk setiap pemangku kepentingan perusahaan?	13	100%	-	-	13	100%
5	Apakah perusahaan telah memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan?	13	100%	-	-	13	100%
6	Apakah dalam sistem penerimaan karyawan, perusahaan telah memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan susku, ras, agama, jender, dan kondisi fisik?	13	100%	-	-	13	100%
7	Apakah dalam pelaksanaan tugasnya, perusahaan telah memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, jender, dan kondisi fisik?	13	100%	-	-	13	100%
TOTAL		85	654	6	46	91	700

Sumber: Hasil jawaban kuesioner, 2011

7. Hasil Jawaban Responden Secara Keseluruhan Tentang Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

No	Prinsip-prinsip *good corporate governance*	Jumlah prinsip-prinsip *good corporate governance* yang diketahui (%)	Jumlah pertanyaan secara keseluruhan	Jumlah pemahaman prinsip-prinsip *good corporate governance* (%)	Jumlah ketidakpahaman prinsip-prinsip *good corporate governance* (%)
1	Transparansi	1761	21	$\frac{1761}{21}$ = 84%	100-84 =16%
2	Kemandirian	515	6	$\frac{515}{6}$ = 86%	100-86 =14%
3	Akuntabilitas	1016	11	$\frac{1016}{11}$ = 92%	100-92 = 8%
4	Pertanggung jawaban	469	5	$\frac{469}{5}$ = 94%	100-94 = 6%
5	Kewajaran	654	7	$\frac{654}{7}$ = 93%	100-93 = 7%

Sumber: Hasil jawaban kuesioner, 2011

Palembang, September 2011

Kepada
Yth. Bapak/Ibu
Pimpinan PT. Kereta Api (Persero)
Devisi Regional III Sumatera Selatan

Assalamualaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penelitian saya, maka saya yang :

Bernama : Gita Evita

NIM : 22 2007 118

Judul Penelitian : "Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Memperbaiki Kinerja Pada PT. Kereta Api (Persero) Devisi Regional III Sumatera Selatan"

Dengan ini meminta waktu Bapak/Ibu kiranya dapat mengisi daftar pertanyaan yang saya berikan. Tujuan penelitian dari pertanyaan-pertanyaan ini adalah untuk bahan dalam menganalisis Penerapan *Good Corporate Governance* yang Diterapkan Pada PT. Kereta Api Devisi Regional III Sumatera Selatan. Data yang saya peroleh ini tidak akan dipublikasikan dan hanya untuk tujuan penelitian. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Hormat Saya,

(Gita Evita)

Responden No. ☐☐

IDENTITAS RESPONDEN

Nama Responden :

Jabatan :

Jenis Kelamin :

Pendidikan terakhir :

Lama kerja :

Isilah pertanyaan-pertanyaan yang ada dengan memberikan *tick mark* atau tanda X sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya.

Informasi Umum *Good Corporate Governance (GCG)*

1. Apakah anda mengetahui apa itu sistem tata kelola perusahaan *(Good Corporate Governance)?*

   ☐ Ya ☐ Tidak

2. Apakah prinsip-prinsip *good corporate governance* telah dilaksanakan dalam perusahaan?

   ☐ Ya ☐ Tidak

3. Jika ya, apa saja?

   ☐ Transparansi

   ☐ Akuntabilitas

   ☐ Pertanggungjawaban

   ☐ Kemandirian

   ☐ Kewajaran

Prinsip Transparansi (*transparency*)

4. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan transparansi?

[ ] Penyediaan informasi yang material dan relevan.

[ ] Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan informasi perusahaan.

[ ] Kejelasan tinggi dan pelaksanaan kegiatan perusahaan

5. Apakah perusahaan telah menyediakan informasi secara tepat waktu?

[ ] Ya [ ] Tidak

6. Jika tidak, mengapa?

.....

7. Apakah perusahaan telah menyediakan informasi secara memadai (memenuhi kebutuhan para stakeholders)?

[ ] Ya [ ] Tidak

8. Jika tidak, mengapa?

.....

9. Apakah perusahaan telah menyediakan informasi secara jelas?

[ ] Ya [ ] Tidak

10. Jika tidak, mengapa?

.....

11. Apakah perusahaan telah menyediakan informasi secara akurat dan dapat diperbandingkan?

[ ] Ya [ ] Tidak

12. Jika tidak, mengapa?

.....

13. Apakah informasi perusahaan mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya?

[ ] Ya [ ] Tidak

14. Jika ya, apa saja informasi yang diungkapkan oleh perusahaan?

[ ] Visi
[ ] Misi
[ ] Sasaran usaha
[ ] Strategi perusahaan
[ ] Kondisi keuangan
[ ] Susunan dan kompensasi pengurus
[ ] Pemegang saham pengendali
[ ] Kepemilikan saham oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris
[ ] Sistem manajemen resiko
[ ] Sistem pengawasan dan pengendalian internal
[ ] Sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya
[ ] Kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan

15. Jika tidak, mengapa?

.....

16. Apakah dengan adanya prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan, kerahasiaan perusahaan akan menjadi berkurang?

[ ] Ya [ ] Tidak

17. Jika tidak, mengapa?

.....

18. Apakah kebijakan perusahaan telah dijelaskan secara tertulis?

[ ] Ya [ ] Tidak

19. Jika tidak, mengapa?

.....

20. Apakah kebijakan perusahaan telah dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan?

[ ] Ya [ ] Tidak

21. Jika tidak, mengapa?

.....

Prinsip Akuntabilitas (*accountability*)

22. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan akuntabilitas (*accountability*)?

[ ] Pertanggungjawaban dari setiap organ perusahaan

[ ] Kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ

[ ] Pertanggungjawaban kinerja perusahaan

23. Apakah perusahaan telah menetapkan rincian tugas masing-masing karyawan perusahaan secara jelas?

[ ] Ya [ ] Tidak

24. Jika tidak, mengapa?

.....

25. Apakah perusahaan telah menetapkan rincian tanggungjawab masing-masing karyawan perusahaan secara jelas?

[ ] Ya [ ] Tidak

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG PERPUSTAKAAN

26. Jika tidak, mengapa?

.....

27. Apakah perusahaan telah memiliki suatu keyakinan bahwa semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggungjawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG?

[ ] Ya [ ] Tidak

28. Jika tidak, mengapa?

.....

29. Apakah perusahaan telah memiliki sistem pengendalian internal?

[ ] Ya [ ] Tidak

30. Jika tidak, mengapa?

.....

31. Apakah perusahaan telah memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran karyawan perusahaan?

[ ] Ya [ ] Tidak

32. Jika ya, dengan cara apa?

.....

33. Jika tidak, mengapa?

.....

34. Apakah perusahaan telah memiliki sistem penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) bagi karyawan?

[ ] Ya [ ] Tidak

35. Jika ya, dengan cara apa?

Penghargaan (*reward*) : .....

Sanksi (*punishment*) : .....

36. Jika tidak, mengapa?

.....

37. Apakah perusahaan telah membuat etika bisnis atas dasar kesepakatan bersama?

[ ] Ya [ ] Tidak

38. Jika ya, apakah dalam melaksanakan tugasnya, setiap karyawan telah berpegang pada etika bisnis yang telah disepakati?

[ ] Ya [ ] Tidak

39. Jika tidak, mengapa?

.....

40. Apakah perusahaan telah membuat pedoman perilaku (*code of conduct*) atas dasar kesepakatan bersama?

[ ] Ya [ ] Tidak

41. Jika ya, apakah dalam melaksanakan tugasnya setiap karyawan telah berpegang pada pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati?

[ ] Ya [ ] Tidak

42. Jika tidak, mengapa?

.....

Prinsip Pertanggungjawaban (*responsibility*)

43. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban (*responsibility*)?

[ ] Pertanggungjawaban atas sistem tata kelola perusahaan

[ ] Pertanggungjawaban atas kinerja perusahaan berdasar perundangan yang berlaku

[ ] Kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap perundangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat

44. Apakah dalam melaksanakan tugasnya setiap karyawan telah berpegang pada prinsip kehati-hatian?

[ ] Ya [ ] Tidak

45. Jika tidak, mengapa?

.....

46. Apakah perusahaan telah mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*)?

[ ] Ya [ ] Tidak

47. Jika tidak, mengapa?

.....

48. Apakah perusahaan telah membuat perencanaan mengenai tanggungjawab sosial (peduli pada masyarakat dan lingkungan sekitar)?

[ ] Ya [ ] Tidak

49. Jika tidak, mengapa?

.....

50. Apakah perusahaan pernah melaksanakan tanggungjawab sosial (peduli pada masyarakat dan lingkungan sekitar) tersebut?

[ ] Ya [ ] Tidak

51. Jika tidak, mengapa?

.....

Prinsip Kemandirian (*independence*)

52. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan kemandirian (*independence*)?

[ ] Pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh

[ ] Pengelolaan secara independen dan tanpa ada pihak lain yang menguasai

[ ] Pelaksanaan GCG secara mandiri dan konsisten tanpa benturan kepentingan dan pengaruh

53. Apakah dalam melaksanakan tugasnya,masing-masing karyawan telah terhindar dari dominasi oleh pihak lain?

[ ] Ya [ ] Tidak

54. Jika tidak, mengapa?

.....

55. Apakah dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing karyawan telah terhindar dari pengaruh oleh kepentingan tertentu?

[ ] Ya [ ] Tidak

56. Jika tidak, mengapa?

.....

57. Apakah dalam melaksanakan tugasnya,masing-masing karyawan telah bebas dari benturan kepentingan dan segala pengaruh/tekanan dari pihak lain?

[ ] Ya [ ] Tidak

58. Jika tidak, mengapa?

.....

59. Apakah dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing karyawan telah melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan?

[ ] Ya [ ] Tidak

60. Jika tidak, mengapa?

.....

61. Apakah dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing karyawan mendominasi/melempar tanggungjawab antara satu dengan yang lain?

[ ] Ya [ ] Tidak

62. Jika tidak, mengapa?

.....

Prinsip Kewajaran (*fairness*)

63. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan kesetaraan dan kewajaran (*fairness*)?

[ ] Kesetaraan dan kewajaran di dalam memenuhi hak-hak stakeholders

[ ] Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders

[ ] Keadilan dan kewajaran di dalam memenuhi hak-hak stakeholders

64. Apakah perusahaan dalam kegiatan rapat telah memberikan kesempatan pada pemangku kepentingan (*stakeholders)* untuk menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan?

[ ] Ya [ ] Tidak

65. Jika tidak, mengapa?

.....

66. Apakah perusahaan dalam kegiatan rapat telah memberikan kesempatan pada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan bagi kepentingan perusahaan?

[ ] Ya [ ] Tidak

67. Jika tidak, mengapa?

.....

68. Apakah perusahaan telah membuka akses atas informasi untuk setiap pemangku kepentingan?

[ ] Ya [ ] Tidak

69. Jika tidak, mengapa?

.....

70. Apakah perusahaan telah memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan?

[ ] Ya [ ] Tidak

71. Jika tidak, mengapa?

.....

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PERPUSTAKAAN

PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DIVISI REGIONAL III SUMATERA SELATAN

SURAT KETERANGAN

No. 16/MSDM/VI/SS-2011

Yang bertanda tangan di bawah ini Manager Sumber Daya Manusia dan Penggajian PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) Divisi Regional III Sumatera Selatan Palembang, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: GITA EVITA
NIM	: 222007118
Jurusan	: Ekonomi Akuntansi
Program studi	: Ilmu Ekonomi
Universitas	: Universitas Muhammadiyah Palembang

Telah selesai melaksanakan penelitian di PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) Divisi Regional III Sumatera Selatan Palembang.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Palembang
Pada tanggal : 14 Juni 2011

a.n. EVP Divisi Regional III Sumatera Selatan
Senior Manager SDM dan Umum
Manager SDM dan Penggajian,

PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DIVISI REGIONAL III SUMATERA SELATAN

IRKHDIS SETIABUDI
NIPP. 40279

ECONOMICS FACULTY
UNIVERSITY OF MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LANGUAGE INSTITUTE & CAREER
Jl. Ahmad Yani - 14 Ulu Palembang
Telp. 0711.511433
e-mail: lbpk_feump@yahoo.com

TOEFL PREDICTION TEST

FULL NAME	TIME TAKEN
Gita Evita	08.00-10.00 AM

SEX	DATE OF BIRTH	TEST DATE
M/F	D / M / Y	D / M / Y
F	26-Mar-1989	29/7/2011

EXAMINEE'S NUMBER
525

TOEFL PREDICTION SCORES

SECTION 1	SECTION 2	SECTION 3	TOTAL SCORE
45	39	39	410

DATE OF REPORT
4/8/2011

Prof. Dr. Indawan Syahri,M.Pd.
Consultant

Muhammad Fahmi., S.E., M.Si
CHAIRMAN

When properly signed, this report certifies that the candidate whose name appears above has taken the TOEFL prediction Test of Economics faculty - language institute & career under secure conditions. This score is valid for only six months. This report is confidential

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

SERTIFIKAT

699/J-10/FE-UMP/SHA/VI/2011

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

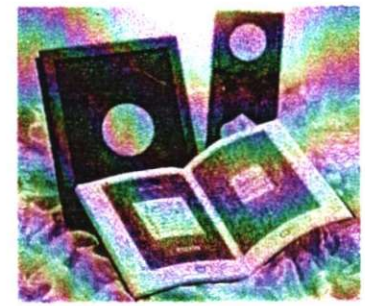

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : GITA ERVITA
NIM : 222007118
JURUSAN : Akuntansi

Yang dinyatakan **LULUS** Membaca dan Hafalan Al - Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan Predikat MEMUASKAN

Palembang, 18 Juni 2011

an. Dekan
Pembantu Dekan IV

Drs. Antoni

Unggul dan Islami

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Gita Evita	PEMBIMBING
NIM : 22 2007 118	KETUA : DR. Sa'adah Siddik, S, E, Ak, M
JURUSAN : Akuntansi	ANGGOTA :

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM MEMPERBAIKI KINERJA PADA PT. KERETA API (PERSERO) DEVISI REGIONAL III SUMATERA SELATAN

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	17 Juli 2011.	Bab 1, 2 dan 3			
2	25 Juli 2011.	Bab 1. 2. & 3			Revisi lagi
3	27 Juli 2011	Bab 4			Perbaiki
4	30 Juli 2011	Bab 4			Jeruskan
5					Bab 5
6	3 Agt 2011	Bab 4			Perbaiki
7		Bab 5			" -
8	5. Agt 2011	Abstrak			
9		Prakata			
10		Daftar Isi			
11		Daftar Pustaka			
12					
13	6 Agt 2011	Skripsi Acc Ujian			
14					
15					
16					

CATATAN

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan Skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Di keluarkan di : Palembang
Pada tanggal : / /

a.n. Dekan
Ketua Jurusan,

NIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS EKONOMI

Created by : Jing.TPH.MT.05.06

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN	IZIN PENYELENGGARAAN	AKREDITASI
JURUSAN MANAJEMEN (S1)	: No. 3450/D/T/2005	No. 018/BAN-PT/Ak-XI/S1/VIII/2008 (B)
JURUSAN AKUNTANSI (S1)	: No. 3449/D/T/2005	No. 020/BAN-PT/Ak-IX/S1/X/2005 (B)
MANAJEMEN PEMASARAN (D.III)	: No. 1611/D/T/2005	No. 005/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/VI/2010 (B)

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu (0711) 511433 Faximile (0711) 518018 Palembang 30263

بسم الله الرحمن الرحيم

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal	**: Jum'at, 19 Agustus 2011**
Waktu	**: 13.00 WIB**
Nama	**: Gita Evita**
NIM	**: 22 2007 118**
Jurusan	**: Akuntansi**
Mata Kuliah Pokok	**: Akuntansi Sektor Publik**
Judul Skripsi	**: ANALISIS PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM MEMPERBAIKI KINERJA PADA PT. KERETA API (PERSERO) DEVISI REGIONAL III SUMATERA SELATAN**

TELAH DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Dr. Sa'adah Siddik, S.E, Ak., M.Si	Pembimbing	27/9/2011	
2	Dr. Sa'adah Siddik, S.E, Ak., M.Si	Ketua Penguji	27/9/2011	
3	Mizan, S.E, Ak., M.Si	Anggota Penguji I	21/9/2011	
4	M. Fahmi, S.E, M.Si	Anggota Penguji II	16/9	

Palembang, 27 September 2011
An. Dekan
Ketua Jurusan Akuntansi

Drs. Sunardi, S.E, M.Si

BIODATA PENULIS

Nama	: Gita Evita
Nim	: 22 2007 118
Tempat, tanggal lahir	: Palembang, 26 Maret 1989
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. Inklaring RT 04 RW 01 Kertapati Palembang
Status	: Mahasiswi
No Hp	: 08984408934
Nama Orang Tua	
Ayah	: RA. Syafardi ST
Ibu	: Efianti
Pekerjaan Orang Tua	
Ayah	: Karyawan PT. Kereta Api Devisi Regional III Sumatera Selatan
Ibu	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Jl. Inklaring RT 04 RW 01 Kertapati Palembang